



**KEPUTUSAN IRLANDIA UTARA MEMILIH BERTAHAN DALAM
REFERENDUM BRITISH EXIT (BREXIT)**

*(NORTHERN IRELAND DECISION TO REMAIN ON BRITISH EXIT
REFERENDUM)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh :

YERY BAGUS IMAN

NIM 120910101035

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

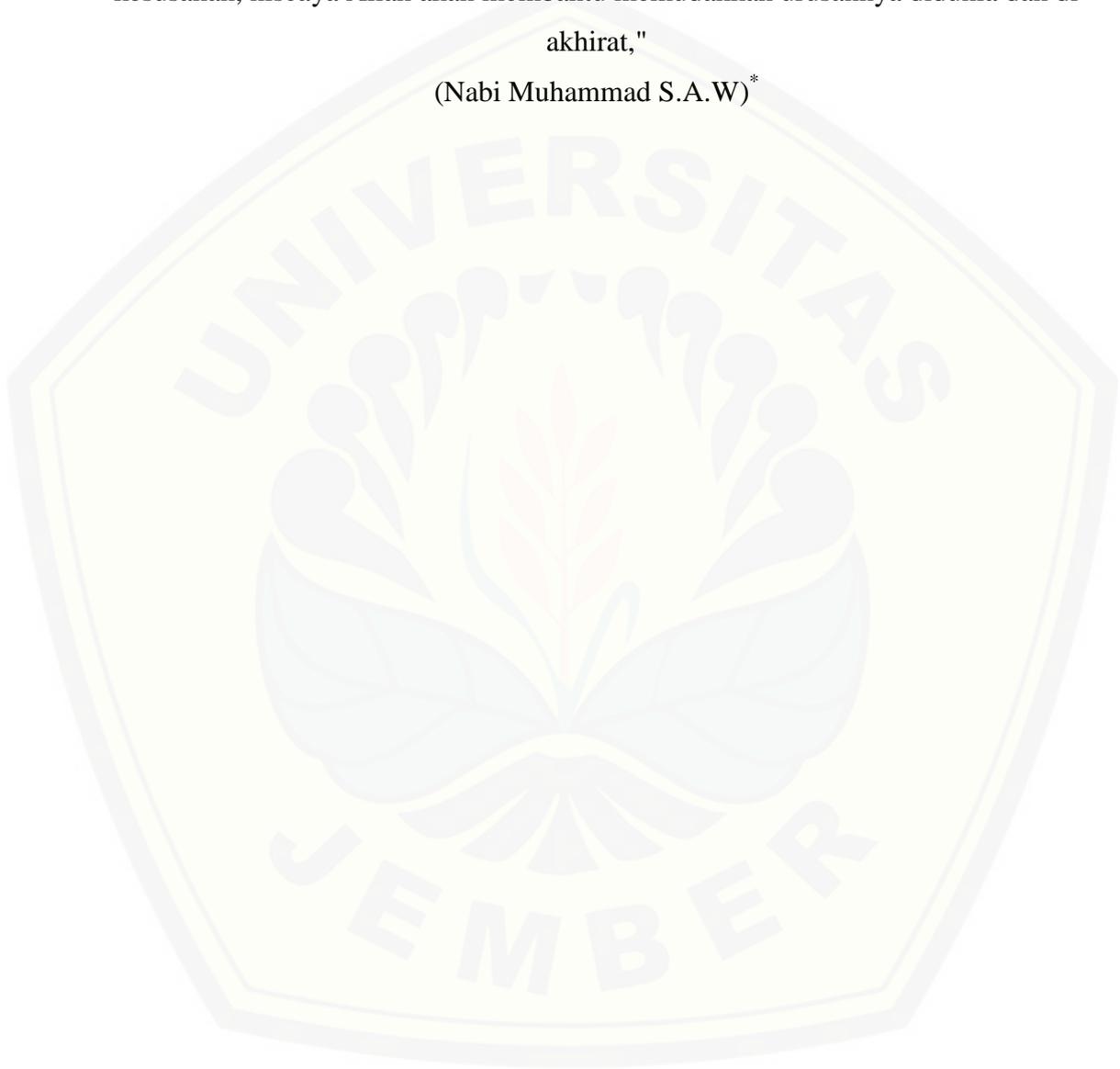
Semua puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya mama Lies Juniani dan papa (Alm.) Erie Imam Sanyoto yang telah dengan sabar merawat saya dari kecil dan senantiasa mendoakan anaknya agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Terima kasih terutama untuk mama yang telah menjadi orang tua tunggal yang kuat dan panutan yang terbaik dalam hidup saya;
2. Keluarga besar saya tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta semangat;
3. Kepada guru-guru dan pengajar penulis sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

"Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan (membantu) kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkannya urusannya didunia dan di akhirat,"

(Nabi Muhammad S.A.W)*



* Bulughul Marom Min Adilatil Ahkaam,

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yery Bagus Iman

NIM : 120910101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Keputusan Irlandia Utara Memilih Bertahan dalam Referendum British Exit (Brexit)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah penulis sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2018

Yang menyatakan,

Yery Bagus Iman

NIM 120910101035

SKRIPSI
KEPUTUSAN IRLANDIA UTARA MEMILIH BERTAHAN DALAM
REFERENDUM BRITISH EXIT (BREXIT)

*APPOINTMENT OF FICTION ANIMATED CHARACTER AS AMBASSADOR
OF THE UNITED NATIONS (UN)*

Oleh:

Yery Bagus Iman

120910101035

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Agus Trihartono, S.Sos., M.A, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Keputusan Irlandia Utara Bertahan Dalam Referendum British Exit (Brexit)” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 15 Januari 2018

tempat : Ruang LKPL, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Supriyadi, M.Si.

NIP 19580317 198503 1 003

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si.

NIP 19721204 199903 1 004

Agus Trihartono, S.Sos.,M.A, Ph.D

NIP 19690815 199512 1 001

Anggota II,

Drs. Djoko Susilo, M.Si.

NIP 19590831 198902 1 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Keputusan Irlandia Utara Memilih Bertahan dalam Referendum *British Exit* (Brexit); Yery Bagus Iman; 120910101035; 2017; 69 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada 24 Juni 2016, Britania Raya melaksanakan referendum terkait keanggotaannya di Uni Eropa yang berawal dari pidato David Cameron dalam kampanye pemilihan umum di Britania Raya tahun 2013. Dalam pidatonya Cameron berjanji jika partai Konservatif memenangi pemilihan umum maka akan menyelenggarakan sebuah referendum yang bertujuan untuk menentukan keanggotaannya di Uni Eropa, yang dikenal dengan Referendum *British Exit* (Brexit). Hasil dari referendum Brexit menyatakan bahwa sebesar 51,9% masyarakat Britania Raya memilih keluar dari keanggotaan Uni Eropa sedangkan 48,1% memilih bertahan di Uni Eropa. Inggris dan Wales memilih keluar sedangkan Skotlandia dan Irlandia Utara memilih bertahan. Meskipun hasil referendum menyatakan bahwa Britania Raya memilih keluar, namun terdapat dua negara yang memilih bertahan, Skotlandia dan Irlandia Utara. Dalam penelitian sebelumnya telah menjelaskan alasan masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan di referendum, namun di penelitian ini penulis mencari lebih dalam lagi alasan pilihan bertahan masyarakat Irlandia Utara. Penulis menggunakan konsep perilaku pemilih untuk menemukan hal-hal yang melatarbelakangi pilihan bertahan masyarakat Irlandia Utara selain dari hasil penelitian sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenis data yang diperoleh adalah data sekunder (*Secondary Data*). Selanjutnya, data sekunder yang didapat dianalisis dengan teknik eksplanasi untuk menemukan hasil dan pertanyaan di rumusan masalah.

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pilihan bertahan yang dilakukan oleh masyarakat Britania Raya dipengaruhi oleh berbagai model dalam

konsep perilaku pemilih. Terdapat tiga model dalam perilaku memilih, model psikologis dan model pilihan rasional. Model psikologis juga mempengaruhi masyarakat dalam memilih bertahan, pemilih mempertimbangkan adanya asumsi masyarakat Irlandia Utara jika memilih Britania Raya keluar dalam referendum maka kebijakan Common Travel Area akan dihapuskan sebagai dampak Britania Raya yang keluar dari Uni Eropa. Model Pilihan Rasional mempengaruhi pemilih bertahan yaitu dengan adanya ketergantungan Irlandia Utara dalam bidang ekonomi terhadap Uni Eropa. Tiga model dalam konsep Perilaku Pemilih telah dapat menunjukkan alasan yang melatarbelakangi masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan dalam referendum *British Exit*.

PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keputusan Irlandia Utara Bertahan Dalam Referendum British Exit (Brexit)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah swt, karena berkat kuasa-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana.
2. Dr M. Iqbal.. selaku Dosen Pembimbing Utama serta Dosen Pembimbing Akademik dan Agus Trihartono, S.Sos.,M.A, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Ardiyanto, M.Si , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Untuk Handayani Novika Sari, terima kasih sudah menemani disaat susah dan senang dalam melalui proses di tahap ini. Sahabat-sahabat saya di MNMA (Adhytia Pahlawan., Andi Saputra, Bertha Viqie, Ganda Atmaja, Pranata Dwi, Januar Tri, Ardi Setiawan, Anifa L., Mirna Ardiyanti, Tri Indah, Sahrian Arif, dan Renza Elma) yang telah membantu, saling berbagi pemikiran dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
6. Teman-teman ku Bos Lukman, Wildan Fu, Ulfa Sarofah, Fuad, Resa, Taufik, Ayu, Dana, Sefty, Dhea, Radita, Riffi, Amiril, Bryan, Nyi, Cipto, dan Koko yang telah memberikan pengalaman berharga dalam hidup saya dan penyusunan skripsi ini.

7. Pembina dan teman-teman Universitas Jember Mengajar (Mas Aziz, Mas Zai, Mas Yova, Rosa, Rose, Fitri, Wiwin, Nanda, Wildan, Eko) yang telah mengajarkan nilai organisasi dan pengalaman bekerja sama;
8. teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2012 yang sering saya reportkan, terima kasih untuk kebersamaan dan pengalaman selama menjalani masa perkuliahan;
9. teman-teman pengurus dan Pembina Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember yang telah memberikan saya banyak ilmu serta kesempatan untuk bekal menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Band musik idola penulis Oasis, The Beatles, Avenged Sevenfold, Sheila on 7, Endank Soekamti, Robbie William, Blink 182, Metallica, Marjinal, The Cranberries, Ari Lasso dan semua seniman yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 27 Februari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup pembahasan	4
1.2.1. Batasan Materi	4
1.2.2. Batasan Waktu	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Landasan Konseptual	5
1.6. Argumen Utama	11
1.7. Metodologi Penelitian	11
1.7.1. Jenis Penelitian	12
1.7.2. Sifat Penelitian	12
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	12
1.7.4. Teknik Analisis Data	13
1.8. Sistematika Penulisan	13

BAB 2. GAMBARAN UMUM BRITANIA RAYA DAN	
UNI EROPA	15
2.1. Profil Uni Eropa	15
2.2. Hubungan Britania Raya dengan Uni Eropa	17
BAB 3. REFERENDUM BRITISH EXIT DI BRITANIA RAYA	27
3.1. Referendum <i>British Exit</i> di Britania Raya	27
3.2. Irlandia Utara dalam Referendum <i>British Exit</i>	31
BAB 4. ALASAN MASYARAKAT IRLANDIA UTARA MEMILIH	
BERTAHAN DI REFERENDUM	42
4.1. Konsep Model Perilaku Memilih dalam Keputusan Masyarakat Irlandia Utara Memilih Bertahan di Referendum Brexit	42
4.2. Model Psikologis Dalam Pilihan Bertahan Masyarakat Irlandia Utara dalam Referendum British Exit (Brexit) tahun 2016	50
4.3. Model Pilihan Rasional Dalam Pilihan Bertahan Masyarakat Irlandia Utara dalam Referendum British Exit (Brexit) tahun 2016	54
BAB 5. KESIMPULAN	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Halaman	
1.1 Hasil Referendum Brexit.....	33
3.1 Total Hasil Pemilih Referendum <i>British Exit</i>	35
3.2 Hasil Referendum negara-negara dibawah Britania Raya	36
3.3 Hasil Referendum Brexit menurut Etnis di Irlandia Utara.....	60
3.4 Hasil Referendum Brexit menurut Agama di Irlandia Utara	61
3.5 Hasil Referendum Brexit menurut Tingkat Pendidikan di Irlandia Utara	61
3.4 Hasil Referendum Brexit menurut Tingkatan Sosial di Irlandia Utara	62
4.1 Konsep Model Perilaku Memilih Masyarakat Irlandia Utara	66
4.2 Data Masyarakat Irlandia Utara Menuju ke Republik Irlandia	70
4.3 Hasil Polling dari Pemilih Partai berhaluan Republik/Nasionalis Bulan April 2016.....	71
4.4 Hasil Polling dari Pemilih Partai berhaluan Republik/Nasionalis Bulan Mei 2016.....	71
4.5 Hasil Polling dari Pemilih Partai berhaluan <i>Unionist</i> Bulan April 2016	72
4.6 Hasil Polling dari Pemilih Partai berhaluan <i>Unionist</i> Bulan Mei 2016	72
4.7 Hasil Referendum Brexit 2016 dari Masyarakat yang Mendukung Partai Politik di Irlandia Utara.....	75

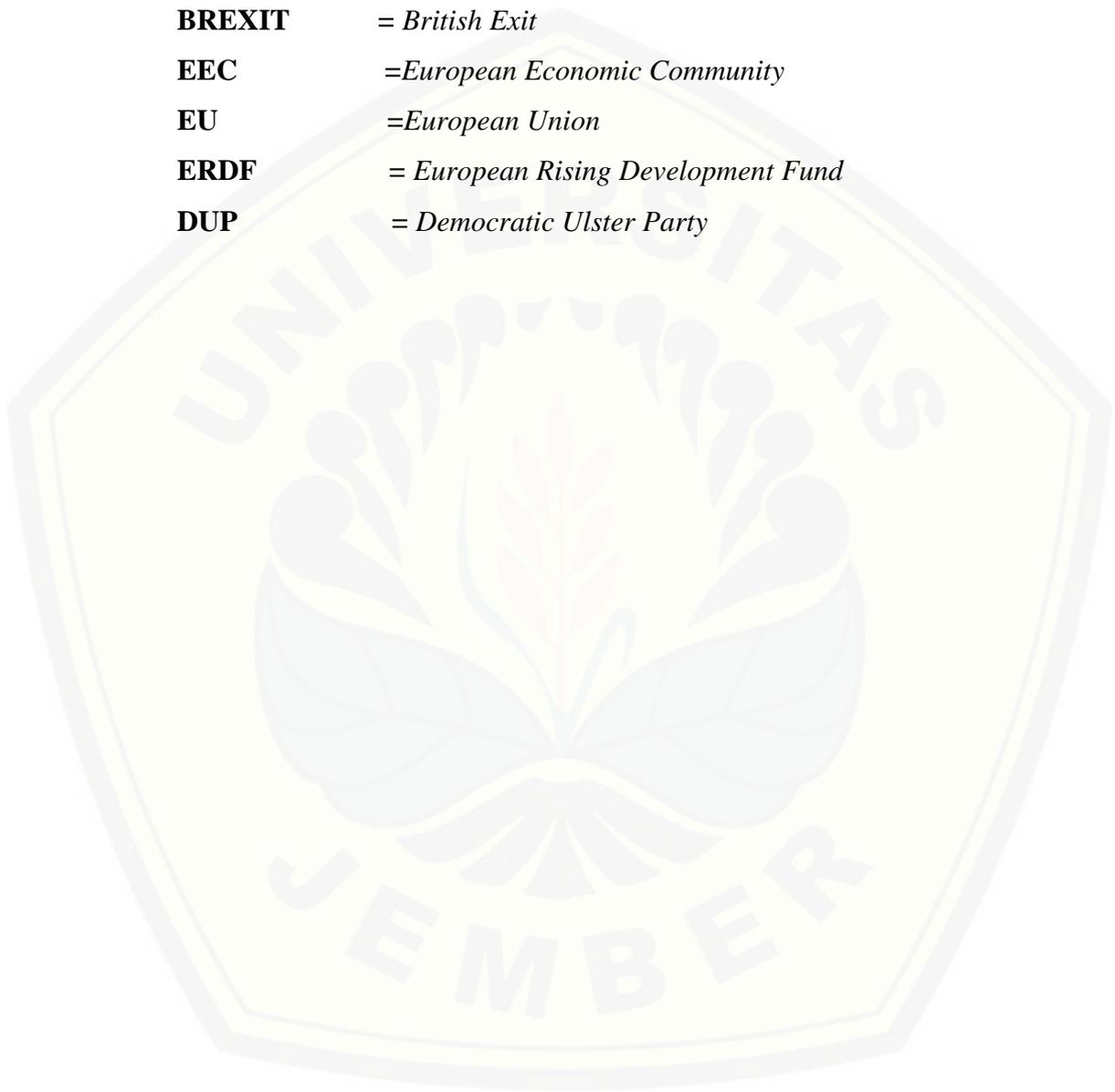
DAFTAR GAMBAR

4.1 Presentase Ekspor Britania Raya ke negara-negara Uni Eropa 75



DAFTAR SINGKATAN

BREXIT	= <i>British Exit</i>
EEC	= <i>European Economic Community</i>
EU	= <i>European Union</i>
ERDF	= <i>European Rising Development Fund</i>
DUP	= <i>Democratic Ulster Party</i>



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas tentang pilihan bertahan oleh masyarakat Irlandia Utara dalam referendum *Brexit (British Exit)* yang diselenggarakan pada 23 Juni 2016. Referendum merupakan salah satu instrumen dalam pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat dibidang politik (Gallagher dan Uleri, 1996) . Referendum merupakan sebuah kegiatan pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan isu-isu berkembang di masyarakat terkait sebuah kebijakan tertentu. Referendum sendiri berbeda dengan pemilihan umum yang sifatnya untuk mengisi sebuah jabatan politis (Heywood, 2002). Dapat dikatakan bahwa referendum merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dengan mekanisme masyarakat memberikan suaranya terhadap isu yang diangkat dalam referendum tersebut, contoh Referendum *Brexit (British Exit)*. Referendum *Brexit* ini berkaitan dengan pilihan masyarakat di Britania Raya untuk menentukan bertahan atau tidak dari keanggotaanya di Uni Eropa. Oleh karena itu, referendum *Brexit* ini sangat penting untuk menentukan langkah Britania Raya kedepannya.

Pada pertengahan tahun 2012, setelah empat tahun krisis ekonomi di zona Eropa, Perdana Menteri David Cameron mendapat tekanan dari anggota Partai Konservatif untuk segera melaksanakan referendum yang berisi sikap Britania Raya untuk meninggalkan atau tetap di Uni Eropa. Pada bulan Januari tahun 2013, Cameron dalam pidatonya menyampaikan janjinya untuk mengadakan referendum tersebut jika memenangkan pemilihan umum di Britania Raya 2015. Kemudian para legislator Partai Konservatif telah mengizinkan rancangan undang-undang yang menjelaskan untuk mengadakan pemungutan suara sebelum akhir tahun 2017. Rancangan undang-undang ini didukung oleh 544 orang sedangkan yang menolak berjumlah 53 orang (BBC, 2013).

Pada awal tahun 2016, David Cameron yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Britania Raya telah mengumumkan bahwa akan menyelenggarakan referendum tentang penentuan nasib keanggotaan Britania

Raya di Uni Eropa. Penyelenggaraan referendum tersebut lebih awal dari janji Cameron dalam pidatonya pada tahun 2015 yang mempunyai target awal tahun 2017. Jadi keputusan yang menentukan Britania Raya keluar atau bertahan tidak bergantung kepada keputusan pihak eksekutif atau legislatif tetapi oleh masyarakat sebagai penentu terhadap keputusan yang akan diambil. Jadi referendum tersebut sangat penting terkait dengan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa.

Pada 23 Juni 2016, referendum tersebut diselenggarakan di Britania Raya dan dikenal dengan istilah “Brexit” (*British Exit*).² Referendum tersebut telah dilaksanakan di 382 wilayah di Britania Raya yang mencakup Inggris, Wales, Skotlandia serta Irlandia Utara. Terdapat 46.500.001 pemilih yang telah terdaftar, namun pemilih yang menggunakan hak suaranya sebesar 33.568.184 atau 72% dari total jumlah pemilih yang terdaftar. Hasil akhir dari referendum tersebut adalah sebanyak, 51,9 % masyarakat Britania Raya memilih untuk keluar dari Uni Eropa, sisanya 48,1% memilih untuk bertahan di Uni Eropa (Brada dan Foster, 2016). Berikut ini hasil perbandingan dari setiap negara di wilayah Britania Raya dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Hasil Referendum *British Exit*

(Sumber: *Telegraph news*)

	Bertahan	Keluar
Inggris	46,6%	53,4%
Wales	47,5%	52,5%
Skotlandia	62%	38%
Irlandia Utara	55,7%	44,3%

Masyarakat Irlandia Utara dan Skotlandia memilih sikap yang berbeda dari Inggris dan Wales dalam referendum *Brexit*. Hasil di Irlandia Utara sebesar

² Penggunaan istilah referendum *British Exit (Brexit)* mengacu pada jurnal-jurnal ilmiah yang penulis temukan.

55,7% dan di Skotlandia sebesar 62% memilih bertahan. Melihat hasil referendum *Brexit* tersebut dapat dikatakan bukan hanya berkaitan antara hubungan Uni Eropa dengan Britania Raya saja, tetapi juga berkaitan dengan hubungan Irlandia Utara dan Skotlandia terhadap Uni Eropa.

Dalam referendum *Brexit* tersebut, masyarakat Irlandia Utara ikut berpartisipasi dalam memilih pilihannya untuk bertahan, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi faktor masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Irlandia Utara yang memilih bertahan saat referendum. Awalnya penulis menyertakan Skotlandia dalam penelitian, namun penulis tidak menemukan data yang mendukung penelitian terkait pilihan bertahan masyarakat di Skotlandia. Selain itu, penulis tertarik untuk meneliti keputusan bertahan oleh masyarakat Irlandia Utara karena kondisi politiknya yang unik terkait referendum dan sejarah konflik domestik di negara Irlandia Utara itu sendiri. Kondisi unik tersebut seperti peran yang diambil oleh pemerintah dan oposisi dalam isu referendum ini telah memberikan pengaruh hingga membuat masyarakat terpecah menjadi dua kubu, yaitu pihak *Unionist* dan pihak Nasionalis. Meskipun pemerintah Irlandia Utara didominasi oleh partai pendukung Britania Raya atau *Unionist* bersaing dengan pihak oposisi yang didominasi oleh partai berhaluan Nasionalis, hal tersebut tidak menjamin bahwa pilihan dari masyarakat sesuai dengan sikap Pemerintah.

Pembahasan-pembahasan tentang referendum *Brexit* di Irlandia Utara telah ada yang meneliti, salahsatu dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Irlandia Utara yang memilih bertahan karena berkaitan dengan sejarah masa lalu Irlandia Utara yang menginginkan untuk merdeka dari Britania Raya (Brokenshire dan Adams, 2017). Namun penelitian yang secara khusus meneliti tentang pilihan bertahan dari masyarakat Irlandia Utara dalam referendum *Brexit* ini belum ada. Penulis akan mengadaptasi konsep perilaku pemilih untuk meneliti lebih dalam lagi dari hasil penelitian sebelumnya dan kemungkinan adanya faktor-faktor yang baru muncul dalam melatarbelakangi pilihan bertahan masyarakat Irlandia Utara tersebut.

Dari penjelasan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan selain dari faktor yang telah diungkapkan pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“Keputusan Irlandia Utara bertahan dalam Referendum British Exit (Brexit)”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam sebuah karya ilmiah bertujuan untuk mempermudah penulis untuk menentukan fokus pokok pembahasan yang dianalisis. Sehingga pokok pembahasan yang kemudian berkembang tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Hal ini berdasar dari definisi ruang lingkup pembahasan, yakni membatasi objek atau permasalahan fungsinya adalah memberikan batasan-batasan yang akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain akan mencegah kemungkinan kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah pengertian (Sutrisno, 1984). Adapun batasan batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Batasan materi
2. Batasan waktu

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi bertujuan untuk mengetahui batasan dari cakupan objek yang akan dianalisa dalam sebuah fenomena. Alasan penelitian ini tanpa Skotlandia (yang juga memilih bertahan) karena saat penelitian penulis tidak menemukan data dari Skotlandia agar bisa disandingkan dengan Irlandia Utara. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi bahasan penelitian dimulai dari gambaran umum sistem politik pemerintahan Irlandia Utara, mencakup sistem kepartaian yang digunakan dan komposisi partai politik yang menduduki parlemen. Selanjutnya akan dipaparkan penjelasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat dan partai politik untuk memilih bertahan di Uni Eropa dalam menanggapi referendum tersebut.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu bertujuan untuk membatasi jangka waktu permasalahan yang diteliti sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Dalam penulisan karya ilmiah ini batasan waktu dimulai sejak dimulainya Referendum Brexit. Pada rentang tahun 2015 hingga 2016, dikarenakan pada rentang waktu tersebut kondisi Irlandia Utara yang dinamis dalam menanggapi referendum brexit tersebut. Meskipun penulis telah menetapkan batasan materi dan batasan waktu dalam penelitian ini, penulis juga akan menambahkan beberapa data faktual lainnya guna memperkuat argumen penulis terkait dengan kepentingan penulisan karya tulis ini.

1.3 Perumusan Masalah

Sebuah penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah secara ideal harus memiliki konsep perumusan masalah untuk memudahkan proses analisa terhadap objek kajian. Rumusan masalah ditetapkan oleh penulis melalui latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis adalah :

“Mengapa masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan di Uni Eropa dalam referendum British Exit?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat Irlandia Utara yang memilih bertahan menjadi anggota dari Uni Eropa, yang tercemrin dari jumlah perolehan suara dari Irlandia Utara dalam hasil referendum yang dilaksanakan 23 Juni 2016 lalu.

1.5 Landasan Konseptual

Dalam karya ilmiah memerlukan sebuah unit analisis untuk memudahkan proses analis dalam pembahasan masalah. Unit analisis yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah teori dan konsep. Teori dan konsep yang dipergunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah yang diangkat dan akan dijelaskan di

kerangka dasar pemikiran ini. Pemilihan teori dan konsep yang dipergunakan tergantung kepada kesesuaian dari permasalahan yang akan diangkat. Sebelum itu, perlu diketahui mengenai pengertian dari teori dan konsep terlebih dahulu. Konsep merupakan simbol yang penting dalam menyampaikan bahasa. Suatu konsep merupakan sebuah bentuk perwakilan dari suatu obyek, sifat suatu obyek, atau sesuatu fenomena. Dapat dikatakan bahwa konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan dan digunakan untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks dengan cara mengategorikan hal-hal yang ditemui berdasarkan ciri-cirinya yang relevan” (Mas’oed, 1990).

Jadi dengan definisi di atas, maka penulis akan mempergunakan konsep Perilaku Pemilih dalam menjelaskan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

1.5.1 Model Perilaku Memilih (*Voting Behavior*)

Untuk menganalisa keputusan masyarakat Irlandia Utara yang memilih bertahan saat referendum, penulis menggunakan konsep perilaku pemilih. Konsep perilaku pemilih merupakan alat analisis yang tepat untuk mengetahui alasan pemilih bertahan di Irlandia Utara dalam referendum (Trihartono, 2014).

Konsep perilaku pemilih memiliki tiga model, yaitu model Sosiologis, model Psikologis, dan model Pilihan Rasional. Model Sosiologis menempatkan beberapa kesamaan seperti agama yang dianut, kesamaan daerah, etnisitas, dan kelas sosial yang sama sebagai komponen-komponen yang penting. Selanjutnya, model Psikologis dalam menentukan pilihan untuk menjadi pemimpin berdasarkan pada daya tarik kepemimpinan yang dimiliki oleh calon pemimpin dan mengidentifikasikan dirinya sebagai pemilih kepada salah satu partai. Dalam model pilihan rasional, pemilih lebih memperhatikan kapabilitas dan kemampuan dari calon pemimpin atau partai untuk mengubah kondisi perekonomian dari pemilih tersebut (Trihartono, 2014). Berikut ini penjelasan lebih lengkap dari ketiga model perilaku pemilih.

a. Model Sosiologis

Model sosiologis ini merupakan model pertama yang dikembangkan sekitar tahun 1950-an. Model ini berasumsi bahwa perilaku memilih dapat ditentukan melalui karakteristik sosiologis para pemilih, yaitu kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan/bahasa (Mujani *et al.*, 2012). Penganut model sosiologis meyakini bahwa seseorang dalam memilih partai atau calon pejabat pemerintahan tertentu disebabkan adanya kesamaan karakteristik sosiologis seseorang tersebut dengan karakteristik sosiologis partai atau calon pejabat pemerintah yang dipilih (Mujani *et al.*, 2012). Pemilih akan cenderung memilih partai atau pejabat pemerintahan yang akan memperjuangkan kepentingan dan perbaikan kelas sosial mereka.

Perbedaan partai dan kepentingan kelas sosial dapat dilihat juga dari sisi historis dan citra masing-masing partai. Maka dari itu, persepsi para pemilih tentang posisi kelas mereka dengan posisi kelas partai politik merupakan suatu hal yang sangat penting (Mujani *et al.*, 2012). Persoalan kelas sosial berkaitan dengan ideologi. Ideologi secara tradisional terbagi menjadi dua katagori yaitu kiri dan kanan. Ideologi kiri mencerminkan berpihak kepada kelas sosial bawah serta ideologi kanan berpihak dengan kelas sosial atas. Kedua aspek tersebut harus menjelaskan perilaku pemilih adalah adanya perbedaan ideology yang jelas dari partai atau calon pejabat publik pemilih (Mujani *et al.*, 2012). Jika perbedaan ideologis ini kabur maka pengaruh dari kelas dan ideologi tidak signifikan (Mujani *et al.*, 2012).

Model sosiologis lainnya yang penting juga dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk memilih partai politik atau pejabat pemerintahan ialah agama. Pemilih akan cenderung memilih partai atau pejabat pemerintah berdasarkan agama yang sama. Contohnya seorang Muslim akan cenderung memilih partai yang memiliki *platform* Islam dibanding agama lain. Orang yang taat beragama cenderung untuk mendukung partai yang ber-*platform* keagamaan dibanding dengan partai yang memiliki *platform* non agama (sekular) (Mujani *et al.*, 2012).

Ada beberapa faktor sosiologis yang terkait dengan masalah kelas sosial dan sentiment keagamaan dalam mempengaruhi perilaku memilih yaitu: ras dan etnik. Partai yang cenderung selalu memperjuangkan kesetaraan ras dan etnik akan cenderung dipilih oleh kelompok-kelompok ras dan etnik minoritas. Terdapat hal lain terkait etnis dalam sentiment kedaerahan. Calon pejabat pemerintah yang memiliki daerah yang sama dengan pemilih, maka peluang terpilihnya pejabat tersebut makin besar (Mujani *et al.*, 2012).

b. Model Psikologis

Untuk menjelaskan pengertian partisipasi dalam pemilihan umum (*voter turnout*), model psikologis telah memperkenalkan budaya demokrasi (*civic culture*), dan secara khusus lagi disebut sebagai budaya partisipasi politik. Pengertian dari model psikologis ini ialah menjelaskan bahwa partisipasi seseorang dalam pemilihan umum disebabkan ketertarikan dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang memadai untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, dan percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*) (Mujani *et al.*, 2012).

Keinginan seseorang berpartisipasi dalam mengikuti pemilihan umum bukan saja berada dalam jaringan sosial, tetapi karena adanya kemauan untuk berpartisipasi. Kemauan berpartisipasi dalam pemilihan umum dapat dikatakan sebagai bentuk keterlibatan dalam politik (*political engagement*). Keterlibatan politik itu sendiri, terdiri dari informasi politik atau pengetahuan politik, ketertarikan politik (*political interest*), perasaan suaranya berkontribusi terhadap adanya perubahan (*internal efficacy*), dan identitas partai (*partisanship*) (Mujani *et al.*, 2012)

Informasi politik merupakan informasi yang dimiliki seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik atau yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pemilih yang mempunyai informasi lebih terkait dengan masalah publik, cenderung mampu untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Ketertarikan politik didukung juga oleh perasaan seseorang yang menganggap

bahwa dirinya mampu memahami, menentukan, dan merasa optimis dalam memahami dan menyikapi masalah publik yang dihadapi oleh suatu bangsa. Sikap tersebut dinamakan kemanjuran politik (*political efficacy*). Maka dari itu, seseorang akan cenderung melihat secara optimis keterlibatannya dalam pemilihan umum (Mujani *et al.*, 2012).

Partisanship atau identitas partai turut berkontribusi juga terhadap partisipasi politik, yaitu suatu keadaan psikologis yang merasa dekat dengan salah satu partai dan siap mendukung setelah mengidentifikasi dirinya dengan identitas partai tersebut. Seseorang yang menjadi partisan akan merasa dirinya bagian dari partai atau mengidentifikasi dirinya dengan partai tersebut. Maka dari itu, seorang partisan akan cenderung berpartisipasi dalam pemilihan umum (Mujani *et al.*, 2012).

Model psikologis mengkritik argumen model sosiologis yang menyatakan bahwa seseorang memilih karenan memiliki sosial ekonomi yang baik dan berada dalam jaringan sosial yang dapat dijangkau partai. Seseorang belum tentu menentukan pilihannya dalam memilih salah satu partai atau calon pejabat pemerintah jika tidak tertarik atau tidak mempunyai ikatan psikologis dengan partai dan calon pejabat pemerintahan tersebut. Maka dari itu, faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis. Model psikologis menjelaskan perilaku pemilih dengan mengembangkan identifikasi diri dengan partai politik atau identitas partai (*party ID*), opini tentang isu dan kebijakan publik yang terkait, dan opini tentang kapabilitas dari tokoh-tokoh partai atau calon-calon yang bersaing dalam pemilihan umum.

c. **Model Rasional**

Dalam model rasional ini, lebih menekankan kepada kapabilitas partai atau calon pejabat pemerintah dalam membantu pemilih untuk memenuhi dan memperbaiki kehidupan ekonominya. Dalam memutuskan pilihannya, pemilih mempertimbangkan berbagai tahapan analisa dan identifikasi, yaitu memperhatikan kondisi ekonominya saat ini di bawah kepemimpinan calon pejabat pemerintah atau partai (egosentrik) dibandingkan dengan kondisi sebelumnya (retrospektif), dan kondisi yang akan datang (prospektif). Pemilih

juga dapat melakukan evaluasi umum atas kondisi ekonomi nasional (sosiotropik) di bawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (retrospektif) dan kondisi ekonomi nasional di bawah pemerintahan sekarang dibandingkan tahun-tahun yang akan datang (prospektif) (Mujani *et al.*, 2012).

Jika keadaan ekonomi negara di bawah pemerintahan sekarang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, maka pemilih akan memberikan sebuah penghargaan (*reward*) dengan memilih kembali partai atau calon pejabat pemerintah yang sedang berkuasa sekarang. Namun sebaliknya, jika keadaan ekonomi negara menjadi lebih buruk dari sebelumnya, maka pemilih akan memberikan sebuah hukuman (*punishment*) dengan tidak memilih pemerintahan sekarang (Mujani *et al.*, 2012).

Meskipun ketiga model perilaku memilih ini digunakan untuk menganalisa pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap partai atau calon pemimpin (Iqbal, 2016). Namun penulis menginterpretasikan model perilaku memilih ini dapat juga digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan partisipasi masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan dalam referendum *British exit*. Perilaku memilih dari masyarakat di Irlandia Utara dijelaskan menggunakan ketiga model diatas. Karena dalam model perilaku pemilih akan dapat mengetahui alasan-alasan dari masyarakat di Irlandia Utara memilih bertahan. Dengan ketiga model tersebut akan menjadi unit analisis yang tepat dalam menjelaskan berbagai faktor masyarakat dalam memilih bertahan.

Perilaku memilih masyarakat Irlandia Utara dalam dilatar belakangi oleh berbagai isu. Maka dari itu, dalam penggunaannya diharuskan untuk mengkombinasikan dari ketiga model perilaku memilih tersebut. Untuk menjelaskan sebuah permasalahan yang kompleks, ketiga model memilih tersebut tidak dapat digunakan secara parsial dengan satu model berdiri sendiri. Dibutuhkan kombinasi dari ketiga model tersebut atau sekurang-kurangnya dua model perilaku memilih untuk menjelaskannya.

1.6 Argumen Utama

Keputusan bertahan masyarakat Irlandia Utara dalam referendum *British Exit*, dapat dianalisa menggunakan model perilaku memilih. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penulis menggunakan model Sosiologis, Psikologis, dan Pilihan Rasional untuk menganalisa permasalahan tersebut.

Keputusan bertahan masyarakat Irlandia Utara dilihat melalui model sosiologis dipengaruhi oleh faktor ethno-nasional antara kaum nasionalis (Katolik) yang memilih bertahan dengan kaum *Unionist* (Protestan) yang memilih keluar. Melalui model psikologis dapat juga diteliti bahwa keputusan masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan dikarenakan kekhawatiran jika Britania Raya keluar dari Uni Eropa maka akan berdampak kepada penghapusan kebijakan *Common Travel Area* yang telah memudahkan imigrasi antara masyarakat Irlandia Utara ke Irlandia. Dalam pilihan rasional masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan dikarenakan ingin tetap mempertahankan kondisi ekonomi yang bagus saat Britania Raya menjadi anggota Uni Eropa. Hal tersebut membuat masyarakat Irlandia Utara memilih Britania Raya untuk bertahan di Uni Eropa dalam Referendum *British Exit*.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis untuk mengumpulkan data dan bagaimana cara menganalisis suatu fenomena/permasalahan. Penerapan metode bermanfaat agar penulis dapat memperoleh kerangka berfikir dan data-data yang dibutuhkan. Diharapkan melalui metode ini, karya tulis dapat tersusun secara sistematis dan kronologis. Berikut ini adalah metode yang digunakan oleh penulis :

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyidikan guna dapat memahami masalah sosial atau masalah yang didasarkan pada penciptaan gambaran holistic dan lengkap yang membentuk kata-kata. Melalui kata-kata tersebut informan

melaporkan pandangannya secara rinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Moelong, 2000).

Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wacana, pidato resmi kenegaraan, catatan lapangan, gambar dan foto serta rekaman video. Penulis mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian “non angka”, tetapi penjelasan tersebut masih tetap menyiratkan pandangan yang “standar” dan *mainstream* adalah penelitian dengan data angka. Jika diperhatikan, dasar penelitian kualitatif ialah yang tertumpu pada kekuatan narasi (Moelong, 2000). Jadi penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan pengumpulan data sedalam-dalamnya. Ketika data yang terkumpul telah mendalam dan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sample lainnya. Hal ini yang ditekankan adalah pada persoalan kesamaan atau kualitas data bukan hanya kuantitas data.

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanasi, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Eksplanasi merupakan suatu cara untuk mencari tahu mengapa sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dapat terjadi (Mas'oed, 1990).

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan data hasil pengamatan pihak lain bukan dengan pengamatan secara langsung, yang berarti penulis tidak berinteraksi secara langsung dengan objek kajian. Metode ini kerap juga disebut sebagai studi kepustakaan.

Untuk mendapatkan data yang valid maka penulis menggunakan data dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Media cetak
4. Situs internet
5. Buku

6. Jurnal dan buku elektronik (e-book)

1.7.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data ini menerangkan bagaimana prosedur penulis dalam memperoleh data-data (Moelong, 2000). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut definisi Jerome Kirk dan Marc Miller, penelitian kualitatif merupakan sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moelong, 2000). Metode ini memfokuskan dalam suatu masalah dimana dalam prosesnya tidak sekedar mengumpulkan dan mengolah data. Pada metode penelitian ini, penulis dituntut untuk dapat meneliti, menganalisis, menginterpretasikan, menjelaskan serta membuat kesimpulan masalah suatu fenomena (Moelong, 2014). Dengan harapan dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis agar isi dari karya ilmiah ini dapat dipahami (Hadi, 1984).

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menyusunnya berdasarkan sistematika yang dibedakan dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Umum Uni Eropa dan Britania Raya

Bab ini akan mencakup sejarah singkat Uni Eropa lalu dilanjutkan dengan dinamika hubungan Britania Raya dan Uni Eropa. Setelah itu akan dijelaskan awal mula diadakannya referendum penentuan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa (Referendum *British Exit*).

Bab III. Referendum *British Exit* di Britania Raya

Bab ini akan membahas referendum *British Exit* di Britania Raya serta Irlandia Utara. Mulai dari penjelasan awal terjadinya hingga dinamika di negara tersebut dalam menanggapi referendum *British Exit*.

Bab IV. Alasan masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan di referendum *British Exit*.

Bab ini akan membahas apa yang menjadi faktor-faktor masyarakat Irlandia Utara dalam memutuskan bertahan di keanggotaan Uni Eropa dalam hasil referendum tersebut, dengan menggunakan kacamata dari konsep yang digunakan dalam penelitian ini juga disertakan hasil survey-survei dan polling.

Bab V. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari karya ilmiah ini yang memuat kesimpulan lengkap berdasarkan pembahasan pada bab–bab sebelumnya.

BAB 2. GAMBARAN UMUM UNI EROPA DAN BRITANIA RAYA

Dalam bab dua ini menjelaskan tentang profil dari Uni Eropa serta dinamika hubungan yang terjadi antara Britania Raya dan Uni Eropa sampai dengan kemunculan awal diadakannya referendum yang menentukan status keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Bab dua dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama atau 2.1. menjelaskan tentang profil Uni Eropa, sub bab 2.2. berisi penjelasan tentang sejarah hubungan Britania Raya dengan Uni Eropa hingga teretusnya ide awal untuk mengadakan referendum *Britain Exit*.

2.1. Profil Uni Eropa

Awal lahirnya organisasi Uni Eropa ini berdasarkan ide “*Never Agains War*” yang melihat kondisi negara-negara di Eropa dahulunya terpuruk karena pasca perang dunia kedua. Hasil dari perang dunia kedua tersebut menyebabkan banyak negara-negara di Eropa menjadi negara yang sangat tidak layak untuk menjadi tempat tinggal manusia, sampai perang dunia berakhir negara-negara tersebut berjuang dengan susah untuk membangun kembali tatanan negaranya.

Berawal dari ide *Never Agains War*, agar konflik antar negara di Eropa tidak kembali terjadi maka pada tahun 1951 beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia, Belgia, Luksemburg, dan Belanda menandatangani sebuah perjanjian di Paris, untuk mendirikan *European Coal and Steel Community* (ECSC). Tujuan dari pembentukan ECSC untuk kerjasama sumber daya alam batubara dan baja yang menjadi satu badan supranasional yang menaungi beberapa negara anggotanya (Union, 2017).

Pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya tahun 1958, ECSC berubah menjadi EEC (*European Economic Community*) yang berlandaskan perjanjian Roma. Tujuan dari perubahan tersebut berdasarkan keinginan negara-negara anggotanya untuk membuat sebuah sistem pasar tunggal yang akan menguntungkan bagi mereka sebagai negara anggota dan meningkatkan nilai perdagangan antar negara anggota. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak negara yang bergabung

dengan MEE dan mengakibatkan semakin meningkatnya kerjasama yang diatur. Pada tahun 1993 negara anggota MEE menandatangani Perjanjian Maastricht yang berisi tentang pembuatan struktur organisasi Uni Eropa (Union, 2017).

Ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Lisbon (*Lisbon Treaty*) maka wewenang dari Uni Eropa semakin besar dalam mempengaruhi kebijakan negara-negara anggotanya di berbagai sektor, seperti pertanian, kebijakan energi, imigrasi, dan anggaran. Lembaga yang membuat kebijakan dalam Uni Eropa adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, Bank Eropa, dan Parlemen Eropa yang anggotanya dipilih oleh warga negara anggotanya semacam dewan perwakilan rakyat. Dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di beberapa bidang dapat melalui musyawarah dari negara-negara anggota dan pada bidang lainnya juga dapat menentukan keputusan tanpa persetujuan negara-negara anggotanya karena lembaga-lembaganya bersifat supranasional. Oleh karena itu Uni Eropa merupakan organisasi yang unik karena merupakan gabungan dari sistem supranasional serta antar pemerintahan (Parliament, 2015).

Uni Eropa mempunyai tujuan untuk meningkatkan serta mensejahterakan masyarakat Eropa dan menciptakan sebuah stabilitas keamanan di kawasan Eropa dengan dilakukannya integrasi ekonomi, keamanan, politik, dan kebudayaan dari negara-negara anggotanya. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Uni Eropa berlandaskan prinsip "*Peace, Prosperity, and Progress*". Prinsip itu mengandung makna bahwa organisasi untuk kedepannya harus berusaha dalam mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan seperti adanya pasar tunggal, kebijakan mata uang bersama, penghormatan kepada hak asasi manusia dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi (Parliament, 2015).

Sebagai yang termasuk daerah ekonomi terkuat di Dunia, Uni Eropa berhasil menjadi organisasi penyumbang 23% dari PDB dunia meskipun total penduduknya hanya 500 juta jiwa atau 7.3% dari populasi dunia. Keberhasilan Uni Eropa sebagai daerah ekonomi yang kuat tidak terlepas dari kebijakan perdagangan bebas serta penghapusan segala hambatan non-tarif yang telah memberikan hasil nyata seperti pengurangan biaya dan harga suatu barang kepada

konsumen. Keberhasilan kebijakan perdagangan bebas di Uni Eropa telah menciptakan banyak lapangan kerja serta pendapatan yang tinggi bagi masyarakatnya. Perdagangan di Uni Eropa meningkat 30% semenjak tahun 1992 (Vasbo, 2015).

Negara yang ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa, harus memenuhi kriteria Kopenhagen. Kriteria Kopenhagen merupakan sebuah peraturan yang mengatur layak atau tidaknya calon negara anggota untuk bergabung dengan Uni Eropa. Calon negara anggota dapat dikatakan layak jika memenuhi tiga kriteria yaitu kriteria politik, kriteria ekonomi, dan kriteria *acquis*. Kriteria politik mencakup pemerintahan yang demokratis, pelaksanaan hukum yang proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk kriteria ekonomi, negara calon anggota harus bersedia dan menyerahkan kebijakan moneternya untuk diatur oleh Bank Eropa tetapi sebelum itu negara harus memenuhi kriteria konvergen terlebih dahulu. Kriteria terakhir, *acquis* merupakan kriteria tambahan yang membebaskan negara anggota untuk memberlakukan undang-undang yang dibuat oleh Uni Eropa. Tujuannya adalah agar posisi negara-negara anggota sejajar dengan badan hukum Uni Eropa (Parliament, 2013).

2.2. Hubungan Britania Raya dengan Uni Eropa

Sebelum menjelaskan tentang sejarah Britania Raya bergabung dengan Uni Eropa, penulis ingin memberikan deskripsi umum tentang Britania Raya dan Irlandia Utara (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*). Britania Raya terletak di pantai barat laut dari benua Eropa. Britania Raya terdiri dari Pulau Britania Raya itu sendiri, di timur laut terdapat Pulau Irlandia dan pulau-pulau kecil. Barat daya Britania Raya berbatasan dengan Negara Republik Irlandia, dan pada bagian utara berbatasan dengan Laut Irlandia. Bentuk negara Britania Raya adalah kesatuan yang dibawah perintah dari monarki konstitusional dan sistem parlementer dan pusat pemerintahannya berada di kota London, Inggris. Britania Raya menaungi empat negara dalam kedaulatannya, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.

Pada tahun 1973, Britania Raya mengalami kondisi inflasi yang lambat serta pertumbuhan ekonomi yang kecil. Perdana Menteri saat itu Harold Macmillan mempunyai gagasan Britania raya untuk bergabung dengan Komunitas Eropa³ untuk dapat membuat ekonomi masyarakat meningkat. Dasar pertimbangan Britania Raya bergabung dengan Komunitas Eropa adalah adanya perbedaan jauh antara Produk Nasional Bruto (PNB) negara-negara anggota Komunitas Eropa dengan pertumbuhan PNB Britania Raya yang semakin turun. Usaha yang dilakukan Macmillan memberikan hasil dengan adanya dukungan dari parlemen, akhirnya Britania Raya di Uni Eropa. Pada tanggal 1 Januari 1973, Britania Raya resmi menjadi negara anggota Uni Eropa.

Meskipun Britania Raya telah bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa dan mendapat berbagai keuntungan sebagai negara anggota, namun masih terdapat pihak yang tidak setuju dengan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Pihak yang kontra menyatakan bahwa keanggotaan Inggris di Uni Eropa telah bertolak belakang dari prinsip nasionalisme yang dimiliki oleh Inggris. Pihak yang tidak setuju berasal dari pemimpin partai Buruh, Harold Wilson yang juga merupakan pemimpin dari pihak oposisi selalu mengkritisi segala bentuk integrasi yang dilakukan oleh pemerintah Britania Raya ke EEC. Referendum tersebut merupakan usulan dari partai Buruh karena kekhawatiran terhadap proses integrasi Britania Raya di Komunitas Eropa. Wilson dalam pidatonya menyatakan akan Dalam pandangan partai Buruh, keanggotaan di Uni Eropa dapat menyebabkan beban bagi Britania Raya karena Britania Raya memiliki kewajiban untuk mengeluarkan biaya namun menerima sedikit manfaat yang diterima. Oleh karena itu Wilson dalam pidatonya berjanji untuk mengadakan negoisasi kembali terkait dengan keanggotaan Britania Raya di EEC apabila partai Buruh menang dalam pemilihan umum Britania Raya tahun 1974.

Pada tahun 1974, Harold Wilson terpilih menjadi perdana menteri Britania Raya dan partai Buruh memenangkan pemilihan umum raya. Dalam pidato kemenangannya, Wilson menyatakan akan segera menyelenggarakan referendum

³ Nama Uni Eropa pada saat itu

untuk menentukan keanggotaan Britania Raya di EEC sebagai bentuk realisasi dari janji kampanyenya. menyelenggarakan referendum yang pertama kali untuk menentukan bertahan atau tidaknya dalam keanggotaan di Uni Eropa.

Namun terdapat pihak yang menentang dan mendukung atas rencana penyelenggaraan referendum tersebut (Harmsen dan Spiering, 2004) Perdebatan antara kubu mendukung pengintegrasian Britania Raya ke Uni Eropa dan kubu yang kontra terhadapnya. Kubu yang pro Eropa berasumsi bahwa dengan gabungannya Britania Raya di Uni Eropa dapat menjadi sebuah langkah awal dalam memasukan nilai dan perspektif Britania Raya ke dalam pusat perekonomian Eropa dan pihak yang mendukung juga berpendapat bahwa referendum sebagai bentuk pemerintah untuk bertanggung jawab kepada rakyatnya.. Sedangkan kubu yang menolak, menyatakan bahwa kedaulatan dan nasionalisme Britania Raya terancam oleh adanya Komunitas Eropa dan merupakan sebuah bentuk kediktatoran(Harmsen dan Spiering, 2004).

Pada 5 Juni 1975, diselenggarakan referendum pertama kali tentang bertahan atau tidaknya Britania Raya di Uni Eropa. untuk menentukan keputusan Britania Raya dalam keanggotaannya di Eropa. Hasil referendum tersebut menyatakan sekitar 67,2% (40.456.877 jiwa) dari warga Britania Raya memilih untuk bertahan di Uni Eropa dan sisanya sebesar 32,8% (8.470.073 jiwa) memilih Britania Raya keluar dari Komunitas Eropa. Suara sah 25.848.654 sedangkan suara tidak sah sebanyak 54.540, total suaranya 25.903.194 (Startin *et al.*, 2016).

Pada saat Margaret Thatcher menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri pada 1979. Latar belakang Thatcher yang berasal dari Partai Konservatif membuat Thatcher mempunyai pemikiran tentang *Euroseptic*⁴ yang mendalam (Gifford, 2008). Menurut Thatcher, Britania Raya tidak sepatasnya untuk tunduk dalam

⁴ Menurut Antonio Carlos Monterio, *Eurosepticism* merupakan sebuah bentuk ekspresi politik yang lebih digunakan untuk menggambarkan sikap politik yang menyalahkan Eropa untuk segala sesuatu yang salah. Namun, apabila tidak sependapat dengan segala sesuatu yang dibuat oleh Uni Eropa, belum tentu dikategorikan juga sebagai Euroskeptis. kemudian pada tahun 1985, koran Inggris *The Times* untuk menggambarkan sikap skeptis dari partai oposisi di Inggris terhadap EC dan berbagai kebijakannya. Margaret Thatcher kemudian memopulerkan istilah tersebut selama masa jabatannya.

sebuah aturan dari Uni Eropa, karena Britania Raya sejak dulu merupakan sebuah negara yang bangga dengan menunjukkan secara nyata rasa etnosentrismenya (Startin *et al.*, 2016). Etnosentrisme yang dimiliki Britania Raya berawal dari adanya kebanggaan sebagai bangsa yang berkualitas dan unggul dibanding bangsa lainnya dikarenakan Britania Raya pada akhir abad ke 16 merupakan negara dengan kekuatan angkatan laut yang mumpuni dan menjadi kekuatan utama di dunia yang pada tahun 1922, kekuasaan Inggris telah meliputi sekitar seperempat luas total wilayah dunia (Britannica, 2016).

Dalam era kepemimpinan John Major sebagai Perdana Menteri, politik luar negeri Britania Raya menekankan pada tiga hal; pertama, menjadikan Britania Raya tetap dihormati sebagai negara berkuasa dengan memiliki senjata nuklir dan menduduki selamanya jabatan sebagai Dewan Keamanan PBB; kedua, aliansi yang erat dengan Amerika Serikat; dan ketiga, tidak ada keinginan untuk bergabung dengan Komunitas Eropa (Startin *et al.*, 2016).

Britania Raya di era John Major mengalami sebuah hubungan pertentangan dengan keanggotaannya di Uni Eropa. Pertentangan tersebut disebabkan oleh keputusan Komunitas Eropa mengeluarkan program pembentukan mata uang bersama melalui EMU (*Economic Monetary Union*). Hal tersebut akhirnya memunculkan pembentukan kelompok baru (sebelumnya terdiri dari kelompok pro-Eropa dan anti-Eropa). Kelompok baru ini mempunyai sikap tegas dalam menolak syarat yang diajukan dalam program EMU dan menolak untuk mengadopsi *euro* untuk menggantikan *poundsterling* namun tidak memiliki niat untuk Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa (Foster, 2008). Dalam buku *Euroscepticism in Contemporary British Politics: Opposition to Europe in the British Conservative and Labour Parties Since 1945*, Anthony Foster telah membagi kelompok kontra EMU menjadi empat bagian; (1) kelompok kontra yang terdiri dari partai atau non partai, (2) kelompok kontra yang anti Komisi Eropa, (3) anti EMU. Pembagian kelompok kontra EMU tersebut telah memunculkan kontroversi dan akhirnya melahirkan sejumlah kelompok dari partai seperti *Pro Euro Conservative Party*, *Keep the Pound* dari partai konservatif, dan *Labour Against the Euro Group*. Kelompok non partai meliputi,

4sterling, Bussiness for Sterling, New Europe, dan the New Alliance. Sejumlah kelompok lama seperti *Democracy Movement, European Movement, dan Britain in Europe* turut juga terlibat dalam perdebatan EMU (Gallagher, 2017).

Namun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair, politik luar negeri Britania Raya bermain peran untuk mendukung keanggotaannya di Uni Eropa. Pemerintah saat itu menyetujui isi dari Perjanjian Amsterdam. Perjanjian tersebut bersifat mengamandemen isi dari perjanjian Maastricht yang mengatur tentang perjanjian Uni Eropa, Perjanjian pendirian Komunitas Eropa, dan segala undang-undang yang terkait. Perjanjian Amsterdam mulai ditandatangani oleh negara-negara anggota Uni Eropa pada 2 Oktober 1997 serta mulai diberlakukannya perjanjian tersebut pada 1 Mei 1999 (Forster, 2002). Hasil dari kebijakan Blair yang mendukung perjanjian Amsterdam ialah Britania Raya menjadi negara yang lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan di bidang ekonomi.

Pada awal 1990-an EMU menjadi isu yang penting dalam perpolitikan di Britania Raya yang akhirnya memunculkan pihak yang mendukung serta pihak oposisi terhadap adanya EMU. Pihak yang mendukung menyatakan jika EMU akan memberikan keuntungan ekonomi seperti nilai inflasi rendah, suku bunga turun, dan membuat pengaruh Britania Raya di Uni Eropa lebih besar. Namun pihak oposisi berpendapat bahwa jika kedaulatan dan kondisi ekonomi Britania Raya akan terancam jatuh karena adanya kebijakan ekonomi yang diatur semuanya oleh Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*). Pada Oktober 1997, Kanselir Gordon Brown mengumumkan bahwa Britania Raya tidak bergabung dengan sistem mata uang bersama dari Uni Eropa. Meskipun Britania Raya tidak bergabung dengan sistem mata uang bersama, Pemerintah mendukung keanggotaan Britania Raya dalam bergabung dengan zona ekonomi Eropa. Kanselir Brown membuat kebijakan percobaan ekonomi jika Britania Raya mengadopsi mata uang bersama, euro. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk mengambil keputusan bergabung atau tidak dengan sistem mata uang bersama. Pada Juni 2003, Brown mengumumkan bahwa Pemerintah memutuskan untuk tidak mengadopsi mata uang bersama

euro. Pemerintah mempunyai alasan bahwa tidak ada kecocokan antara kondisi ekonomi Britania Raya dengan Eropa. Hal yang menjadi ketidakcocokannya adalah adanya suku Bunga yang tinggi dari Uni Eropa yang akan membuat ketidakstabilan di bidang properti. Selain itu, Pemerintah menilai terdapat banyak masalah ekonomi yang terjadi di Eropa. Blair melihat keanggotaan di EMU dari sisi positif yang membuat peran Britania Raya lebih besar di Uni Eropa. Sedangkan Brown lebih memandang sebagai bentuk pelemahan dari kondisi ekonomi Britania Raya (Startin *et al.*, 2016).

Dukungan publik untuk keanggotaan UE dan integrasi telah lebih jauh semakin rendah di Inggris daripada di negara anggota lainnya. Namun masyarakat Britania Raya juga kurang memiliki pengetahuan tentang UE daripada Rekan-rekan benua Eropa mereka. Sejumlah penjelasan mungkin ditawarkan. Pertama, UE memiliki simbolisme negatif, karena integrasi dinilai dalam hal hilangnya kedaulatan dan ancaman terhadap identitas nasional. Survei menunjukkan bahwa identitas nasional lebih kuat di Inggris daripada di tempat lain di UE, dan identifikasi dengan Eropa lebih lemah. Kedua, kekurangan union lebih disiarkan dari pada keberhasilannya. Publik Inggris kurang dilayani oleh liputan media UE? jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih menginginkan informasi berkualitas lebih baik. Surat kabar seperti Daily Express, Sun dan Daily Mail menawarkan berita dari cerita Eurosceptic populis, sementara The Times mengambil posisi Eurosceptic yang lebih dianggap. Daily Mirror adalah tabloid pro-Eropa utama; The Guardian, The Independent dan Financial Times juga sangat mendukung. Pemilih juga mendapat informasi dari televisi. Namun sebuah laporan tahun 2005 yang ditugaskan oleh BBC mengkritik liputan berita tentang UE karena terlalu menyederhanakan.

Parlemen telah menjadi arena utama perdebatan tentang hubungan Inggris dengan Uni Eropa. Di sini manajer partai dapat memberi tekanan pada calon pemberontak untuk mengikuti garis batas. Tapi debat publik di Eropa pada umumnya telah dipromosikan (dan didominasi) oleh pembangkang yang ingin mempublikasikan kasus mereka. Berbagai kelompok Eurosceptic telah berdiri sejak akhir 1980an. Beberapa, seperti Grup Bruges (sebuah badan lintas partai,

meski sebagian besar terdiri dari Konservatif) muncul di arena parlemen; yang lain disiapkan oleh think tank (misalnya Better Off Out) atau organisasi bisnis (misalnya Business for Britain). Manajer partai sering mengambil sikap santai terhadap pengelompokan ini, dengan harapan mereka akan melepaskan tekanan dalam partai tersebut, namun mereka memperluas persyaratan perdebatan dengan mempromosikan pilihan penarikan dari UE.

Pemerintahan Blair telah mengusulkan untuk mengadakan referendum mengenai keanggotaan Inggris di negara eropa dan pada Perjanjian Konstitusional Uni Eropa. Keputusan Departemen Keuangan tahun 2003 bahwa tes ekonomi belum terpenuhi mengakhiri prospek referendum mengenai keanggotaan EMU. Rencana referendum tentang Perjanjian Konstitusional dibatalkan setelah suara 'no' tahun 2005 di referendum di Prancis dan Belanda, dan Blair dan Brown kemudian menolak mengadakan referendum mengenai Perjanjian Lisbon yang dirujuk ke bawah. Namun, tekanan untuk pemungutan suara yang populer mengenai hubungan Inggris dengan Uni Eropa sedang dibangun dengan Konservatif dan Demokrat Liberal sekarang berkomitmen untuk mengadakan referendum jika kekuasaan dialihkan ke UE dalam sebuah perjanjian baru? sebuah posisi yang diberi pijakan hukum di Uni Eropa Act 2011.

Partai politik dapat menjanjikan referendum integrasi UE untuk menyelesaikan sebuah isu yang menyebabkan perpecahan intra partai, memperkuat posisi elektoral dan melemahkan saingan mereka. Hal ini berlaku untuk keputusan Wilson untuk memanggil referendum EEC 1975 dan renegotiasi referendum Cameron. Komitmen Cameron terhadap referendum in-out yang dikurangi (namun tidak berakhir) di Partai Konservatif, memberi partai ini posisi yang khas dan populer dalam masalah UE karena Buruh menolak untuk mencocokkan janji tersebut untuk mengadakan referendum di parlemen berikutnya, dan membantu memenangkan beberapa pemilih Konservatif yang telah mempertimbangkan untuk membelot ke UKIP. Tapi, meski perpecahan intra partai dapat disembunyikan karena janji mengadakan referendum, kemungkinan besar akan terpapar selama kampanye.

Pertanyaan referendum EU akan 'Haruskah Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa atau meninggalkan Uni Eropa? '. Komisi Pemilihan Umum merekomendasikan pertanyaan ini setelah pemerintah mengajukan pertanyaan tersebut 'Haruskah Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa?', Dengan pemilih memilih 'ya' atau 'tidak' pada kertas suara. Opini publik tentang masalah ini berfluktuasi dalam beberapa dekade terakhir, namun jajak pendapat pada tahun 2015 melaporkan dukungan mayoritas untuk tetap tinggal di UE (lihat Tabel 13.1). Mereka juga menunjukkan bahwa sejumlah pemilih percaya bahwa Inggris akan lebih buruk dan kurang berpengaruh di luar UE. Namun sebagian besar pemilih pada tahun 2015 mengatakan bahwa mereka dapat berubah pikiran, atau memang demikian tidak tahu bagaimana mereka akan memilih. Kampanye referendum juga memainkan peran penting dalam membujuk dan memotivasi pemilih.

Tingkat dukungan terkuat untuk keanggotaan UE ditemukan di antara mereka yang memiliki gelar universitas, kaum muda dan profesional kelas menengah. Mereka yang merasa bahwa Uni Eropa memberikan keuntungan ekonomi dan memiliki pengetahuan yang baik tentang Uni Eropa lebih cenderung memiliki pandangan positif terhadap UE. Tingkat tertinggi oposisi terhadap UE Keanggotaan ditemukan di antara mereka yang memiliki sedikit kualifikasi pendidikan, orang tua dan mereka yang berada dalam pekerjaan tidak terampil. Orang yang memiliki identitas nasional kuat (terutama mereka yang sangat mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Inggris), tidak puas dengan politik dan bermusuhan dengan imigrasi lebih cenderung mempertahankan pandangan Eurosceptic. Pendukung UKIP secara tidak mengejutkan berkemungkinan untuk mendukung penarikan dari UE, dengan Demokrat Liberal dan pendukung Buruh umumnya mendukung keanggotaan. Saat Pemungutan suara dalam sebuah referendum, pemilih sering mengambil isyarat dari partai politik yang mereka dukung. Namun, pemilih Konservatif akan menerima pesan campuran dalam referendum yang sedang berlangsung dengan Cameron mendesak dukungan untuk keanggotaan tapi banyak anggota parlemen Konservatif berkampanye untuk meninggalkan UE.

Kampanye referendum in-out akan melihat perdebatan ekstensif mengenai biaya dan manfaat keanggotaan UE. Perdebatan akan mencakup argumen utilitarian dan nilai. Argumen utilitarian memusatkan perhatian pada biaya ekonomi dan manfaat keanggotaan UE (lihat Kontroversi 13.2), sedangkan argumen berbasis nilai menyoroti isu-isu seperti kedaulatan, demokrasi dan identitas.

Pada tahun 2011, krisis utang di Eropa muncul menjadi isu yang dominan di Uni Eropa. Beberapa negara anggota sepakat untuk menguatkan EMU sebagai solusi mengatasi krisis tersebut, tetapi Britania Raya memilih untuk tidak ambil bagian dalam masalah tersebut atau berkontribusi dalam memberikan dana talangan. Perdana Menteri Britania Raya saat itu, David Cameron memveto kebijakan fiskal dari Uni Eropa saat pertemuan Dewan Eropa pada Desember tahun 2011. Ketika tuntutan Cameron tentang usul kebijakan untuk mengamankan pasar tunggal dan layanan keuangan ditolak, tetapi Cameron meyakinkan 25 negara anggota lainnya untuk menandatangani perjanjian antar pemerintah dalam stabilitas, kordinasi, dan pemerintahan, koalisi tersebut meminta jaminan bahwa proses integrasi di zona Eropa tidak melemahkan pasar tunggal maupun diskriminasi terhadap negara yang bukan anggota Uni Eropa. Perjanjian tersebut menjadikan penguatan pada pasar tunggal, meningkatkan persaingan dan menegosiasikan perjanjian *Transatlantic Trade and Investment Partnership* dengan Amerika Serikat. Meskipun kebijakan yang diusulkan oleh Cameron berjalan namun sejak awal Britania Raya kehilangan pengaruh di Uni Eropa saat kebijakan tersebut diluncurkan (Startin *et al.*, 2016).

Dalam menanggapi tekanan dari pihak euroskeptis dan kebangkitan UKIP (*United Kingdom Independence Party*), di tahun 2013 Cameron dalam pidatonya menyampaikan jika partai Konservatif memenangkan pemilihan umum, dia akan mengadakan sebuah referendum tentang penentuan keluar atau tidaknya Britania Raya dari Uni Eropa yang akan diselenggarakan paling lambat akhir tahun 2017. Cameron sendiri mengkampanyekan Britania Raya untuk bertahan di Uni Eropa. Dalam kampanyenya, Cameron mengidentifikasi beberapa tujuan dalam mereformasi Uni Eropa. Reformasi dalam membuat perdagangan bebas lebih baik

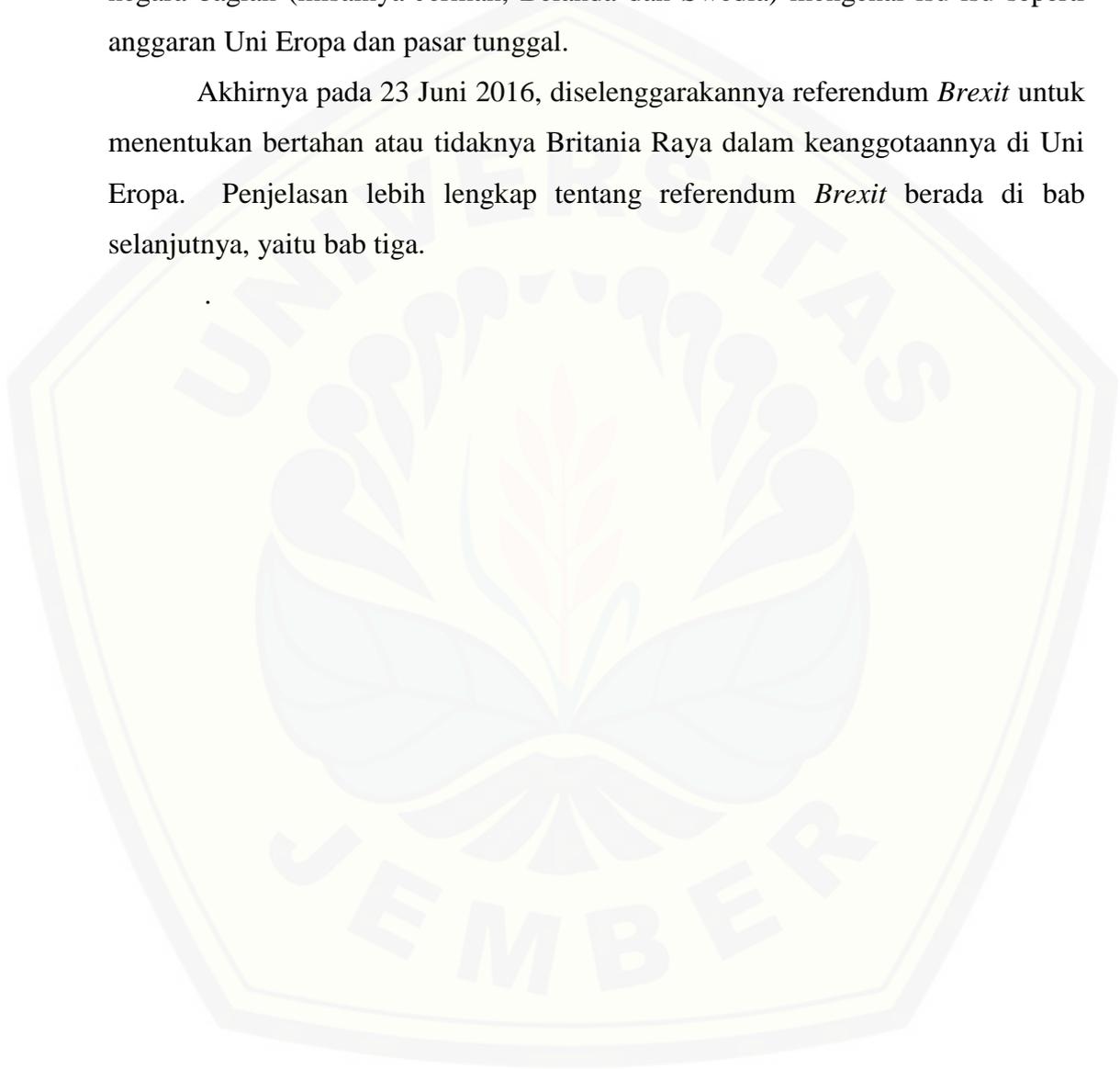
lagi, menginginkan adanya pengurangan birokrasi di Uni Eropa, dan bekerja sama dengan parlemen untuk menghalangi beberapa undang-undang dari Uni Eropa yang merugikan kebijakan domestik dari negara anggota. Namun seperti api jauh dari panggang, kampanye Britania Raya untuk bertahan di Uni Eropa kalah oleh kampanye yang menginginkan Britania raya untuk keluar dari Uni Eropa. kampanye itu digagas oleh pihak *Unionist* yang terdiri dari sebagian anggota partai Konservatif seperti, Boris Johnson dan Peter Cruddas lalu pada partai Buruh terdapat Gisela Stuart dan dari Partai UKIP adalah Suzanne Evans (Bond *et al.*, 2016).

Dalam sebuah studi tentang kebijakan Inggris di UE, Stephen George menggambarkan Inggris sebagai An Awkward partner (Oxford: Oxford University Press, edisi ke-3, 1998). George tidak mengklaim bahwa Inggris adalah satu-satunya negara yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dalam UE, namun hal itu kurang antusias terhadap integrasi daripada kebanyakan negara anggota dan cenderung memiliki posisi minoritas. Pemerintah Inggris yang berturut-turut telah mewaspada, atau menolak, proposal untuk integrasi lebih lanjut. Alih-alih memiliki visi jangka panjang, mereka sering bertindak secara pragmatis, bereaksi terhadap proposal daripada menetapkan agenda. Inggris lebih menyukai kerja sama antarpemerintah dengan otoritas supranasional, pasar tunggal untuk EMU, dan reformasi inkremental prosedur EU untuk serikat politik.

Pengaruh Inggris kurang terasa dibandingkan dengan negara anggota besar lainnya, terutama Prancis dan Jerman. Pemerintah Thatcher dan Mayor tidak mengatur agenda EMU, namun bereaksi terhadap proposal dari negara lain dengan mencoba memperlambat laju integrasi atau meminimalkan dampaknya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Inggris tidak penting dalam setiap keputusan EU yang besar. Inggris adalah pendukung yang berpengaruh dari pasar tunggal, meskipun demikian Inggris mengusulkan pendekatan minimalis terhadap reformasi kelembagaan. Pemerintahan Blair juga merupakan pemain berpengaruh dalam pertahanan UE, imigrasi dan kebijakan sosial. Namun Inggris belum menempa aliansi yang tahan lama dengan negara-negara yang berpikiran sama dalam berbagai isu, namun mengembangkan serangkaian kesepakatan satu kali

dengan negara-negara anggota mengenai isu-isu tunggal. Pemerintah Blair membentuk hubungan bilateral sebagai dasar inisiatif bersama, misalnya dengan Perancis mengenai kebijakan pertahanan, Jerman mengenai kebijakan sosial dan Italia dalam menangani imigrasi ilegal. Cameron bekerja dengan 'aliansi utara' negara bagian (misalnya Jerman, Belanda dan Swedia) mengenai isu-isu seperti anggaran Uni Eropa dan pasar tunggal.

Akhirnya pada 23 Juni 2016, diselenggarakannya referendum *Brexit* untuk menentukan bertahan atau tidaknya Britania Raya dalam keanggotaannya di Uni Eropa. Penjelasan lebih lengkap tentang referendum *Brexit* berada di bab selanjutnya, yaitu bab tiga.



BAB 3. REFERENDUM *BRITISH EXIT* DI BRITANIA RAYA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang awal referendum *British Exit* (*Brexit*) hingga hasil dari referendum tersebut, dan disertai sejarah kemunculan referendum hingga isu Referendum *Brexit* yang berkembang di negara Irlandia Utara. Penulis akan membagi bab tiga ini menjadi empat sub bab. Sub bab 3.1. berisi tentang awal terselenggaranya referendum *Brexit* hingga hasil dari referendum tersebut, sub bab kedua menjelaskan tentang dinamika dan sikap yang diambil oleh negara Irlandia Utara tersebut dalam menanggapi referendum *Brexit*.

3.1. Referendum *British Exit* di Britania Raya

Referendum merupakan sebuah bentuk pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat untuk turut andil dalam memilih untuk menentukan nasib dari negara tersebut kedepannya. Contoh pada 5 Juni 1975, Britania Raya mengadakan sebuah referendum untuk menentukan keanggotaannya di Komunitas Eropa⁵, masyarakat harus memilih salah satu dari pilihan bertahan atau keluar (Walsh, 2016).

Awal diselenggarakannya kembali referendum untuk menentukan keanggotaan di Uni Eropa pertama kali digagas oleh David Cameron pada Januari 2013. Cameron berjanji jika partai Konservatif memenangkan pemilihan umum, tahun 2015, akan mengadakan sebuah referendum untuk menentukan bertahan atau tidaknya Britania Raya dalam keanggotaannya di Uni Eropa.

Pada tahun 2015 setelah pemilihan umum di Britania Raya usai, yang menghasilkan partai Konservatif memenangkan banyak kursi di parlemen. Cameron telah mengumumkan adanya negosiasi untuk membahas keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa serta akan menyelenggarakan referendum yang membahas keanggotaan Britania Raya dalam Uni Eropa. Cameron menyatakan

⁵ Nama dari Uni Eropa

jika ini merupakan sebuah langkah besar masyarakat Britania Raya untuk masa yang akan datang (BBC, 2015).

Sebagai partai pemenang pemilihan umum Britania Raya, pemerintah konservatif membuat sebuah rancangan undang-undang yang akan mengatur tentang segala urusan penyelenggaraan referendum penentuan keanggotaan di Uni Eropa selambat-lambatnya dilaksanakan pada akhir 2017. Rancangan undang-undang tersebut disetujui pada 17 Desember 2015 (BBC, 2015).

Undang-undang referendum tahun 2015 mengatur tentang hak warga Britania Raya untuk memilih dalam referendum. Hak pilih warga tersebut seperti hak pilih saat pemilihan umum parlemen Britania Raya. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang lokasi pemungutan suara yang tersebar di seluruh daerah Britania Raya. Tempat pemungutan suara tersebut berjumlah 382 daerah dan setiap tempat pemungutan suara memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan suara referendum (BBC, 2016).

Sebelum referendum *Brexit* (*British Exit*) 2016 ini diselenggarakan, terdapat banyak perdebatan diantara masyarakat Britania Raya. Pihak yang melakukan perdebatan ialah antara yang mendukung *Brexit* dan pihak yang menolak *Brexit*. Perdebatan yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut membahas berbagai masalah dalam bidang ekonomi, imigrasi hingga kedaulatan negara terkait dengan keputusan Britania Raya untuk keluar atau tidak dari keanggotaan Uni Eropa.

Bidang imigrasi merupakan topik utama yang menjadi perdebatan diantara kedua pihak tersebut. Isu imigrasi merupakan isu utama yang dikampanyekan oleh pihak pendukung *Brexit*, mereka berpendapat bahwa Britania Raya kehilangan kendali dalam mengatur imigran yang masuk ke negaranya jika tidak keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat kebijakan Uni Eropa yang mengatur secara bebas perpindahan masyarakat dan hak untuk tinggal bagi masyarakat negara-negara anggota Uni Eropa. Namun pihak yang menolak *Brexit* menyatakan bahwa keluarnya Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa tidak akan menyelesaikan masalah imigran dikarenakan masih adanya pintu masuk yang dapat dimanfaatkan oleh para

imigran dari Kota Calais di Prancis menuju ke Kota Dover di Inggris⁶ (Young dan Anne McKeown, 2016).

Perdagangan menjadi isu yang diperdebatkan oleh kedua pihak tersebut. Pihak *Brexit* melihat isu perdagangan ini sebagai sebuah isu yang sangat penting karena hubungan perdagangan Britania Raya dengan negara-negara anggota Uni Eropa dinilai menghambat serta membatasi hubungan dagang yang dilakukan Britania Raya kepada negara-negara diluar Uni Eropa yang lebih menjanjikan. Pihak yang kontra menyatakan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun (2012, 2013, 2014), yaitu Pada tahun 2012, nilai ekspor ke Uni Eropa sebesar 50.5% lalu nilai ekspor ke negara non-Uni Eropa sebesar 49.5%, pada 2013 sebesar 50.3% ekspor menuju ke Uni Eropa dan sebesar 49.7% menuju ke negara non-Uni Eropa, dan pada tahun 2014, sebanyak 51% ekspor menuju ke Uni Eropa dan 49 % menuju ke negara non-Uni Eropa. Dapat dikatakan bahwa nilai ekspor Britania Raya ke negara-negara Uni Eropa lebih besar daripada ekspor ke negara non-Britania Raya, yang berarti Britania Raya mendapat banyak manfaat dari perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa (Murphy, 2016).

Selanjutnya isu kedaulatan menjadi isu yang menjadi senjata utama oleh pihak *Brexit* dalam mengkampanyekan tujuannya. Mereka mempunyai keyakinan bahwa Britania Raya kehilangan kedaulatan jika mengadakan kerjasama dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Keyakinan tersebut berdasarkan banyaknya krisis yang menimpa salahsatu negara anggota dan berdampak pada negara anggota Uni Eropa lainnya, dan dari hal tersebut dapat mengancam sebuah kedaulatan yang dimiliki Britania Raya. Pihak yang kontra dengan *Brexit* menyatakan bahwa untuk era globalisasi seperti saat ini merupakan sebuah kewajiban suatu negara untuk saling kerjasama dengan negara lainnya. Jika Britania Raya mengisolasi terhadap kerjasama antar regional seperti di Uni Eropa maka dapat menyebabkan sebuah kehancuran untuk masa yang akan datang (Goodwin dan Heath, 2016).

⁶ Kedua kota tersebut dipisahkan oleh Selat Dover.

Penjelasan diatas adalah sebagian argumen yang diperdebatkan oleh pihak *Brexit* dan pihak yang kontra *Brexit*. Kedua kelompok tersebut membentuk sebuah kelompok resmi yang bertugas untuk mengkampanyekan kepentingannya, seperti pihak *Brexit* yaitu “*Vote Leave*” dan pihak yang kontra yaitu “*Britain Strongger in Europe*”. Kelompok resmi tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengkampanyekan posisi mereka dalam isu-isu tertentu yang akan mempengaruhi pelaksanaan referendum *Brexit* 2016 (Startin *et al.*, 2016).

Tabel 3.1 Total hasil pemilih Referendum *British Exit*

(Sumber: Theguardian)

Hasil Keseluruhan		
	Jumlah Suara	Presentase Suara
Keluar	17.410.742	51.9%
Bertahan	16.141.241	48.1%
Selisih suara untuk Keluar	1.269.501	3.8%
Jumlah suara sah	33.551.983	
Suara tidak sah	25.359	
Total suara	33.577.342	

Warga Britania Raya yang memilih saat referendum total berjumlah 33.577.342, yang terdiri dari suara sah sebanyak 33.551.983 lalu suara tidak sah sebanyak 25.359. Sebanyak 51.9% suara keluar dan sebanyak 48.1% suara untuk bertahan Selengkapnya akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini (Kirk, 2016). Berikut ini merupakan hasil dari referendum dari keempat negara di Britania Raya (Theguardian, 2016).

Tabel 3.2 Hasil Referendum negara-negara dibawah Britania Raya

(Sumber: Theguardian)

	Bertahan	Keluar
Inggris	46,6%	53,4%

Wales	47,5%	52,5%
Skotlandia	62%	38%
Irlandia Utara	55,7%	44,3%

3.2 Irlandia Utara dalam Referendum *Brexit*

Posisi Irlandia Utara dalam Referendum *Brexit* yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016, merupakan salah satu peristiwa penting dalam bidang politik serta masyarakat Britania Raya. Hubungan Irlandia Utara dengan Uni Eropa sangat kuat dan mendukung keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Tidak seperti Britania Raya, masyarakat di Irlandia Utara sedikit yang mendukung partai politik yang bersikap euroskeptisme (Forster, 2002).

Pada tahun 1975, Britania Raya melaksanakan referendum yang menentukan keanggotaannya di Uni Eropa dengan hasil 67.2 % masyarakat memilih bertahan di Uni Eropa dan 32.8% memilih keluar dari Uni Eropa. Hasil dari masyarakat Irlandia Utara saat referendum 1975 adalah sebanyak 52.1% memilih untuk bertahan sedangkan 47.9% memilih untuk keluar. Referendum *Brexit* tahun 2016 merupakan bentuk dari sikap *United Kingdom Independence Party* (UKIP) sebagai partai Euroskeptis yang menganggap keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa merupakan sebuah bentuk kerugian lalu dalam kampanye pemilihan umum Britania Raya, David Cameron berjanji untuk melaksanakan referendum penentuan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa (Fruen *et al.*, 2017).

Hasil survei pendapat telah memunculkan budaya politik antara kaum unionist dan nasionalis di Irlandia Utara, yang berhasil mempengaruhi hampir keseluruhan pilihan dalam referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Partai politik nasionalis terbesar di Irlandia Utara, *Sinn Fein* (SF), *the Social Democratic*, *the Ulster Unionist Party* (UUP) dan *Labour Party* (SDLP) serta *Green Party* dan *Centrist Alliance Party* (AP) menyatakan untuk mendukung suara bertahan di referendum *Brexit*. Sementara itu, sebagian partai politik serikat seperti, *the Democratic Unionist Party* (DUP), *United Kingdom Independence*

Party (UKIP), Progressive Unionist Party (PUP), dan the Traditional Unionist Voice (TUV) yang mengkampanyekan untuk memilih keluar (Burke, 2016).

Sinn Fein dahulu merupakan partai politik Euroskeptisme dan tidak mendukung Britania Raya untuk terintegrasi dengan Eropa pada referendum 1975. Namun sejak akhir 1990 partai ini mengadopsi kebijakan untuk terlibat dalam Uni Eropa. Tercemin dalam posisi partai yang mengkampanyekan untuk memilih tetap dalam referendum *Brexit 2016*. Pada Desember tahun 2015, partai *Sinn Fein* menetapkan tiga tujuan yang ingin dicapai: untuk melawan pihak yang ingin Britania Raya keluar dari Uni Eropa, untuk mengkampanyekan agar suara Irlandia Utara dihargai, dan untuk mendorong terbentuknya kerjasama yang lebih besar lagi antara Irlandia Utaran dan Republik Irlandia. *Sinn Fein* saat ini peduli terhadap perbatasan yang harus diperketat disaat Britania Raya memilih untuk keluar dalam referendum tahun 2016, agar tidak menimbulkan kekacauan aktifitas ekonomi di kedua negara (Irlandia Utara dan Republik Irlandia) termasuk kemungkinan untuk pemberlakuan kembali pos pemeriksaan dan penentuan tarif perdagangan (Dennison, 2015).

Sinn Fein memberikan perhatian utama kepada hubungan yang tertuju ke beberapa detil dari bukti tertulis partai kepada permintaan komite Urusan Irlandia Utara pada pemerintah Britania Raya yang berisi topik tentang Irlandia Utara dan Referendum Uni Eropa. Misalnya, ketika memiliki beberapa kritik ideologis ke Uni Eropa dan memetakan hubungan antara kelompok kiri Eropa di Parlemen Eropa, *Sinn Fein* melihat *Brexit* sebagai bentuk langkah yang merugikan Irlandia Utara, merugikan bagi penegakan kemanusiaan dan juga pendanaan dari Uni Eropa. Pada dasarnya *Sinn Fein* mendukung Eropa yang sosialis dengan menekankan kepada kesetaraan, inklusi, transparansi, dan akuntabilitas yang demokratis. *Sinn Fein* telah mengkampanyekan sebuah rencana yang terbaik untuk diterapkan dengan Uni Eropa (McCann *et al.*, 2016).

Partai Buruh, dibawah kepemimpinan dari Colum Eastwood, memproklamkan Partai Buruh sebagai partai satu-satunya yang terus konsisten mendukung Eropa di Irlandia Utara dan melihat *Brexit* sebagai tindakan yang mengakibatkan keburukan bagi Britania sendiri, Eropa, dan merupakan sebuah

bencana bagi Irlandia Utara sendiri. Partai Buruh berpendapat bahwa Uni Eropa dapat memberikan dampak yang baik bagi Irlandia Utara, terutama untuk memperkokoh proses perdamaian di Irlandia Utara, sebagai penyedia dana dan juga meningkatkan hubungan suku Anglo-Irlandia. Selain itu Partai Buruh juga memainkan isu dimensi sosial dan kewarganegaraan dari Uni Eropa dan menyoroti keuntungan finansial untuk bidang industri pertanian serta mereka berpendapat bahwa Irlandia Utara tidak bisa untuk mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat (London). Partai Buruh mengkampanyekan untuk memilih bertahan dalam referendum *Brexit* pada 23 Juni 2016. Dengan melanjutkan keanggotaan maka dapat menunjukkan keamanan, stabilitas dan kebebasan untuk orang, barang dan jasa, dan tidak ada rencana cadangan untuk membuat Britania Raya meninggalkan Uni Eropa (Kentish, 2016).

Seperti Partai Buruh, aliansi partai pendukung Uni Eropa dan Partai Hijau juga ikut mengkampanyekan untuk memilih bertahan dalam Referendum *Brexit*. Alasan dari aliansi pendukung Uni Eropa untuk memilih bertahan dikarenakan besarnya peran Uni Eropa dalam menuntaskan masalah hambatan-hambatan ekonomi melalui akses menuju pasar tunggal dan Irlandia Utara mendapat pendanaan dari Eropa (Alliance Party, 2016:82). Perjuangan partai yang mendukung Uni Eropa harus dilakukan dengan cara yang tepat untuk tetap menjaga Irlandia Utara dalam Uni Eropa dan dapat mencapai perubahan yang progresif. Aliansi partai tidak mengadopsi perangkat referendum Uni Eropa namun sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konferensi Partai Hijau pada Februari 2016, telah menyatakan sikap terhadap referendum *Brexit*, yaitu Partai Hijau menyetujui pentingnya masyarakat untuk memberikan pilihannya untuk bertahan atau keluar Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa dalam referendum; serta mengapresiasi lembaga Uni Eropa atas dibuatnya undang-undang tentang perlindungan lingkungan dan tenaga kerja oleh Uni Eropa. Britania Raya harus tetap menjadi bagian dari Uni Eropa daripada berjalan sendiri tidak bersama-sama (BBC, 2017).

Sikap berbeda ditunjukkan oleh DUP (*Democratic Unionist Party*), partai ini dikenal dengan sikap euroskeptisnya yang kuat dan menyatakan sikap untuk

tetap mendukung serta terus berkampanye agar Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Tidak hanya pada kampanye saja, DUP juga mendukung diselenggarakannya referendum dan mendorong pemerintah menepati janjinya untuk segera menegosiasi ulang hubungan Britania Raya dengan Uni Eropa. Pada Juni 2016, Ketua DUP sekaligus Menteri Pertama Irlandia Utara, Arlene Foster menyatakan bahwa dia telah mendengarkan berbagai argumen dan perdebatan dari semua sisi terkait dengan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa, dan telah mencapai hasil bahwa pilihan yang tepat adalah memilih keluar dari Uni Eropa dan memegang kembali kekuasaan atas masa depan Britania Raya (White, 2016). Sebelumnya itu anggota representatif dari DUP telah membuat sebuah program Britania Raya keluar dari Uni Eropa, bersama dengan didukung beberapa partai seperti UKIP (*United Kingdom Independence Party*), Partai Konservatif, TUV (*Traditional Unionist Voice*), politikus dari Partai Buruh Kate Hoey, dan beberapa partai pendukung *Brexit*. Tema besar dari program tersebut adalah mengkritik kepada kinerja Komisi Eropa, sifat Organisasi Uni Eropa yang supranasional mencampuri urusan domestik negara anggotanya, dan biaya yang dikeluarkan oleh Britania Raya dalam menyokong anggaran dari Uni Eropa (McCann dan Hainsworth, 2016).

Pada waktu yang sama, DUP memberikan kritik kepada pihak yang anti *Brexit* terkait pernyataan dari mereka yang menilai jika keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa merupakan sebuah ancaman bagi proses perdamaian di Irlandia Utara. Selain itu, DUP juga melihat ketidakberhasilannya negosiasi dan penawaran yang dilakukan oleh David Cameron dengan Uni Eropa terkait keanggotaan Britania Raya di organisasi tersebut. DUP juga menekankan kembali bahwa memilih bertahan atau keluar dalam referendum tersebut adalah hak dari masyarakat bukan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu (Telegraph, 2016).

Berbeda dari alasan klasik yang disampaikan oleh DUP tentang keraguan untuk bergabung dengan Uni Eropa, posisi UUP (*Ulster Unionist Party*) terhadap isu *Brexit* ini mengilustrasikan pertentangan wajar dan perbedaan di kubu internalnya mengenai Uni Eropa. UUP telah menghabiskan waktu yang lama

dalam mendiskusikan pernyataan sikap resmi mereka terhadap referendum tersebut. UUP sendiri telah membuat langkah yang besar dalam menilai hasil dari negosiasi yang dilakukan oleh David Cameron dengan Uni Eropa sebelum membentuk sebuah opini untuk memilih bertahan atau keluar. UUP menganggap terlalu penting untuk diputuskan secara spontan terkait keanggotaan Uni Eropa (UUP, 2016:5). Namun sebelum UUP menentukan sikap posisinya dalam *Brexit*, UUP melihat beberapa faktor kunci sebagai penentuan sikapnya yaitu, pembiayaan, keamanan, imigrasi, dan masalah perbatasan yang dimiliki oleh Irlandia Utara. Berdasarkan hasil pertemuan beberapa petinggi partai, UUP telah menyatakan sikap untuk mengkritik partai yang memilih bertahan dan partai yang memilih keluar untuk tetap memilih bertahan. Karena UUP meyakini bahwa kondisi Irlandia Utara akan stabil dan lebih baik ketika bertahan di Uni Eropa, dan menekan Pemerintah Britania Raya untuk mempertimbangkan manfaat dari perdagangan bebas dari keanggotaan Uni Eropa bukan hanya memetingkan masalah politik kebangsaan sendiri (Murphy, 2016).

Peran Uni Eropa di Irlandia Utara telah terjalin dalam berbagai bidang, salah satunya adalah keamanan. Uni Eropa membentuk *European Arrest Warrant* (EAW) yang bertugas untuk membantu mengawasi hasil dari perjanjian *the Good Friday Agreement*.⁷ EAW juga bertugas untuk melawan teroris dan kasus kriminal yang mengancam negara. Dari tahun 2004 hingga awal tahun 2013, EAW telah menangkap 192 tersangka kriminal dan teroris diserahkan kepada pihak berwenang Britania Raya oleh Irlandia Utara dibawah EAW. Kepolisian Eropa lainnya dan badan yudisial seperti Europol dan Eurojust juga sering

⁷ Perjanjian the Good Friday Agreement mengatur tentang pembagian kekuasaan eksekutif dalam sidang paripurna Irlandia Utara, perjanjian baru tentang perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia dan pelimpahan wewenang pemerintahan dalam satu koordinasi Britania Raya melalui Westminster dan Dublin. Republik Irlandia setuju untuk menyerahkan 10 daerah yang diklaim oleh mereka kepada Irlandia Utara serta penonaktifan aktifitas militer untuk menjaga ketertiban di Irlandia Utara dan pelepasan beberapa tahanan militer.

berkerjasama dengan kepolisian Britania Raya dan Irlandia Utara dalam melawan aksi terorisme dan investigasi kasus kriminal antar perbatasan⁸ (Burke, 2016).

Irlandia Utara mendapatkan bantuan dana yang besar dari program pembiayaan Uni Eropa. Sejak tahun 2007 hingga 2013, Uni Eropa telah memberikan dana sebesar 2,4 milyar euro untuk membantu Irlandia Utara yang sedang membangun kembali beberapa daerahnya pasca konflik. Pendanaan tersebut diatur oleh badan tersendiri yang dibentuk oleh Uni Eropa. Pada tahun 2007, telah dimulai pengimplementasian dari perjanjian *St. Andrews*. Perjanjian tersebut berisi tentang usaha pemulihan kondisi di Irlandia Utara pasca konflik dengan cara pembagian kekuasaan di tingkat eksekutif. Jose Manuel Barroso, Presiden Komisi Eropa saat itu telah membentuk satuan kerja di Irlandia Utara yang terdiri dari 18 unit di Komisi Eropa. Pemerintah Irlandia Utara mengimplementasikan grup satuan kerja yang dibuat oleh Barroso dengan memberikan kursi dua menteri muda dalam parlemen; mereka juga dibantu oleh pegawai negara untuk komisi di parlemen, dan sebagai bentuk representasi tetap dari Britania Raya dan Irlandia Utara di Uni Eropa. Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama bertugas juga untuk membentuk sebuah kebijakan khusus dengan target untuk mendapat akses dari program pendanaan Uni Eropa (McCann dan Hainsworth, 2016).

Antara tahun 2007 dan 2013, Irlandia Utara memiliki rekor yang buruk dalam mengaplikasikan dana kerangka program ketujuh Uni Eropa dari beberapa daerah di Britania Raya yang menerima dana tersebut. Perekonomian Irlandia Utara memiliki sejumlah kelemahan struktural⁹. Uni Eropa mencoba untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Irlandia Utara yang tidak memiliki keahlian dengan menempatkan beberapa program dengan dana 472 juta Euro kepada penduduk yang berumur muda atau berada di usia aktif bekerja untuk

⁸ Europol bertugas untuk melaksanakan prosedur penukaran tahanan dan melaksanakan fungsi intelejen; Eurojust memfasilitasi dalam mengumpulkan serta saling bertukar informasi dan bukti dari pelaku kejahatan transnasional dan juga jaringan teroris

⁹ Seseorang di Irlandia Utara yang berada pada usia kerja tidak memiliki kualifikasi daripada daerah lain di Britania Raya (European Commission, Northern Ireland in Europe)

diadakan pelatihan keahlian pekerjaan. Pelatihan tersebut berguna untuk menambah keahlian baru dan untuk mengatasi permasalahan sosial di Irlandia Utara¹⁰ (McCann dan Hainsworth, 2016)

Irlandia Utara mendapat bantuan pendanaan dari Uni Eropa sejak tahun 1995 hingga 2020. Uni Eropa telah membuat program yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan di Irlandia Utara dan juga mengurus urusan konseling untuk menyembuhkan trauma dari konflik puluhan tahun lalu serta proses membangun lagi perdamaian di perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Program tersebut ialah PEACE I(1995-1999), PEACE II (2000-2006), PEACE III (2007-2013) & PEACE IV (2014-2020). Program tersebut telah menghabiskan dana sebesar 1,3 Milyar Euro. Seiring dengan berjalannya waktu, lebih dari 5000 masyarakat di Irlandia Utara menerima program konseling penyembuhan trauma pasca konflik dengan Republik Irlandia yang dibiayai oleh Uni Eropa. Dana tambahan sebesar 229 juta Euro telah dialokasikan ke program PEACE IV, dana tersebut merupakan tambahan untuk pembiayaan pembangunan daerah-daerah di Irlandia Utara dan di sepanjang daerah perbatasan di Republik Irlandia dari tahun 2014 dan 2020 (Phinnemore *et al.*, 2016). Masyarakat sipil Irlandia Utara turut membantu juga dalam mengurangi ketegangan yang terjadi selama periode kebuntuan kondisi politik yang panjang. Beberapa pendanaan juga berasal dari pemerintah Irlandia Utara yang diberikan kepada Dewan Hubungan Komunitas Masyarakat independen. Tetapi pemerintah Irlandia Utara tidak dapat memberikan bantuan kepada beberapa kegiatan politik yang bersifat sensitif, seperti melibatkan militer atau gerakan yang bersifat separatis (Phinnemore *et al.*, 2016).

Di seluruh Irlandia Utara, menjelang pemilihan, kelompok yang berkepentingan menjadi sangat aktif dalam mempromosikan posisi masing-masing. Sejumlah kelompok berkepentingan secara tergesa-gesa didirikan untuk mewakili lobi Remain, sementara yang lain menyesuaikan kampanye mereka untuk fokus pada masalah yang satu ini. Dua lobi utama yang tersisa adalah

¹⁰ Dari 33.540 partisipan di program ini, 17.347 mendapat kualifikasi di level kedua yang berarti tingkat keahlian yang lebih dalam pekerjaan(Ibid)

Inggris yang kuat di Eropa dan Bisnis untuk Eropa Baru, sementara Gerakan Eropa dan Konfederasi Industri Inggris (CBI) mengembangkan profil substansial yang mempengaruhi persepsi publik mengenai perdebatan tersebut. Untuk the leave camp, ada Vote Leave, Leave.EU, Grassroots Out, Konservatif untuk Inggris, labour leave, dan Go.

Kampanye referendum dibuat resmi pada tanggal 14 April 2016 dengan pengabaian dua kelompok kampanye utama: Britain Stronger in Europe dan Vote Leave. Kelompok berkepentingan lawan masing-masing dikonsolidasikan menjadi dua blok kampanye yang diakui, keduanya mendirikan cabang di Irlandia Utara. Bagi Britain Stronger in Europe, logo 'NI IN' menjadi gambar utama selama kampanye berlangsung. Kampanye tetap menarik dukungan dari berbagai organisasi yang membantu kampanye penggalangan dana yang berkelanjutan dan berhasil (Britain Stronger in Europe, 2015). Seperti kampanye Leave di wilayah ini, hal itu sangat bergantung pada argumen dari kampanye umum sambil juga mencoba mengenalkan, jika mungkin, isu-isu khusus Irlandia Utara, seperti kemungkinan dampak buruk pada proses perdamaian, pemotongan untuk pertanian dan agribisnis industri makanan, dan reintroduksi perbatasan 'keras' antara Utara dan Selatan Irlandia.

Sebaliknya, kampanye Vote Leave, yang beroperasi dengan dukungan DUP pada khususnya, mampu memobilisasi blok politik serikat pekerja yang mapan dan sering mengandalkan juru bicara DUP untuk mengartikulasikan tema utama (Vote Leave, 2016). Ketua kampanye, Lee Reynolds, adalah pemimpin DUP di Belfast City Council dan menjadi juru kampanye yang paling vokal dan terlihat untuk sisi Leave (www.eudebateni.org/referendum05/). Juga, dengan Wakil Pemimpin DUP, Nigel Dodds MP, di dewan lobi Vote Leave di tingkat Inggris, pengaruh partai tersebut diakui pada tahap yang lebih luas dan akibatnya pengaruh politik meningkat sepanjang periode tersebut. Sementara kampanye dioperasikan di bawah panji 'vote leave take control', Vote Leave juga dapat terlihat diprofilkan secara tradisional dengan bahasa Irlandia Utara di beberapa wilayah (kebanyakan anggota serikat dan loyalis) di mana istilah itu dilukis di

dinding dan jembatan, seperti juga beberapa pro -Brexit kutipan yang diilhami oleh alkitabiah.

Di luar kelompok kampanye Leave dan Remain, berbagai organisasi lainnya menjadi aktif di seluruh wilayah yang menyediakan berbagai forum untuk diskusi dan debat (ScopeNI, 8 April 2016). Di dalam serikat pekerja, ada dukungan luas untuk kampanye Leave dengan hak pekerja menjadi perhatian utama mereka. Salah satu serikat regional yang signifikan, bagaimanapun, Asosiasi Layanan Publik Irlandia Utara, dalam sebuah pemungutan suara anggota mengenai posisi tersebut, secara terbuka mendaftarkan preferensi untuk Leave dan merekomendasikan agar anggotanya memilih Brexit (Belfast Telegraph, 3 Juni 2016). Sebagai alternatif, Komite Irlandia utara-Kongres Serikat Pekerja Irlandia (NIC-ICTU) meminta anggota untuk memilih Remain, dengan fokus pada masalah yang sangat terkait dengan gerakan serikat pekerja lintas negara Irlandia: pendapatan petani, program pembangunan, proyek perdamaian Uni Eropa, hak asasi manusia, Perjanjian Jumat Agung, dan hak pekerja (NIC-ICTU, 24 Juni 2016).

Selain itu, setelah sebuah jajak pendapat dari anggotanya sendiri, pada bulan Mei 2016, Dewan Aksi Sukarela Irlandia Utara (Northern Ireland Council for Voluntary Action / NICVA), badan payung untuk organisasi sektor masyarakat dan sukarelawan, dengan menantang meminta pemungutan suara . Dalam jajak pendapatnya terhadap 850 anggota, 80 persen mengindikasikan bahwa mereka berniat untuk memilih Remain, sementara 20 persen akan memilih Leave. Pada sebuah konferensi NICVA tentang referendum, 74 persen dari mereka yang hadir terdaftar bahwa mereka akan memilih Remain. Konsensus di sektor ini diperkuat oleh pernyataan bersama oleh berbagai kelompok berkepentingan pada tanggal 22 Juni. Pernyataan tersebut, yang ditandatangani oleh Direktur CBI Nigel Smyth, Asisten Sekretaris Jenderal NIC-ICTU Peter Bunting, Chief Executive NICVA Seamus McAleavey, Kepala Eksekutif Perdagangan Ecepenet Gabungan Irlandia Utara Glyn Roberts, Direktur Asosiasi Makanan dan Minuman Irlandia Utara Michael Bell, Manufacturing NI Chief Executive Stephen Kelly dan Eksekutif Kamar Dagang Londonderry.

Sinead McLaughlin, menyatakan bahwa: 'Mewakili bisnis, pekerja dan sektor sukarela dan masyarakat, kami yakin bahwa kemakmuran masa depan Irlandia utara lebih baik di dalam Uni Eropa' (NICVA, 22 Juni 2016). Pernyataan tersebut juga merujuk pada data mengenai pengaruh Uni Eropa dalam perekonomian Irlandia Utara, dengan sekitar 26.000 usaha kecil dan menengah di kawasan tersebut mengandalkan perdagangan ke pasar tunggal dan 50.000 pekerjaan 'mungkin' terkait dengan perdagangan dengan negara anggota UE lainnya. Sektor lain yang sangat berpengaruh dalam perekonomian Irlandia Utara, sektor makanan agribisnis, lebih terbagi dalam masalah ini. Serikat Petani Ulster (UFU), sementara pada awalnya menyatakan bahwa tidak ada kasus yang menarik untuk Brexit, saat berkonsultasi dengan anggotanya, sepakat untuk menyerahkan keputusan tersebut kepada tiap individu (Belfast Telegraph, 27 Juni 2016).

Pada bulan Maret 2016, satu intervensi kontroversial dalam kaitannya dengan kampanye tersebut berasal dari Komisi Amal ketika memperingatkan badan amal di Irlandia Utara mengenai implikasi hukum untuk mempromosikan sebab-sebab politik. Surat pengarahan Komisi Amal untuk badan amal membuat jelas di seluruh organisasi tersebut harus 'tetap independen dan sepenuhnya non-partisan' atau berisiko melakukan pelanggaran hukum amal (Komisi Amal untuk NI, Maret 2016: 9). Sebelumnya, pada bulan November 2015, Center for Democracy and Peace Building (CDPB) telah meluncurkan 'EU Debate NI' dengan CDPB mengambil posisi netral sehubungan dengan referendum. Inisiatif ini dimaksudkan untuk menyediakan ruang bagi dialog seputar isu-isu namun CDPB juga menyelenggarakan sejumlah diskusi yang dihadiri dengan baik untuk mempertemukan juru kampanye dari kedua belah pihak untuk melihat kemungkinan implikasi Brexit. Mengenai surat kabar setempat, surat kabar regional mencetak selebaran ganda (atau lebih) setiap hari menjelang keputusan pemungutan suara. Juga, kampanye digital, media sosial baru - terutama Twitter, Facebook, WhatsApp, Google, dan Instagram - berperan dalam kampanye. Blogging, twitter feed, dan bot otomatis juga ikut bermain. Rangkaian aktivitas media sosial ini tercermin dalam keluasan dan skala komunikasi seputar isu-isu di

Irlandia Utara, seperti yang diajukan melalui Twitter dan Google Search / Analytics secara khususnya.

Berikut ini penulis akan membuktikan hasil penelitian sebelumnya dan pernyataan-pernyataan diatas terkait dengan alasan masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan dalam referendum *British Exit* dengan survey dan hasil referendum. Penulis menggunakan hasil survei bulan April dan Mei 2016 yang berisi pilihan dari kaum nasionalis dan kaum *unionist* dalam memilih di referendum *Brexit*. Dengan menggunakan hasil survei tersebut diharapkan dapat mengetahui secara lebih rinci pilihan dari masyarakat Irlandia Utara saat memilih di referendum.

Tabel 3.3 Hasil Referendum Brexit menurut Etnis di Irlandia Utara

	Bertahan	Keluar
British	37%	63%
Irish	87%	13%

Irlandia Utara mempunyai dua etnis, yaitu *British* dan *Irish*. Dalam tabel 3.3 merupakan hasil referendum Brexit 23 Juni 2016 berdasarkan etnis yang memilih. Masyarakat yang beretnis *British* cenderung untuk memilih keluar. Sedangkan masyarakat yang beretnis *Irish* mayoritas memilih bertahan. Etnis *British* masyarakatnya sebagian besar berhaluan *Unionist* sedangkan etnis *Irish* sebagian besarnya merupakan nasionalis.

Tabel 3.4 Hasil Referendum Brexit menurut Agama di Irlandia Utara

	Bertahan	Keluar
Katolik	85%	15%
Protestan	40%	60%

Jika partai politik memiliki *platform* keagamaan yang sama dengan masyarakat, cenderung akan dipilih oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan Tabel 3.4 yang menjelaskan tentang hasil referendum Brexit berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat Irlandia Utara. Masyarakat yang menganut agama katolik sebagian besar merupakan berhaluan nasionalis dan hasilnya mereka cenderung memilih untuk bertahan. Sedangkan masyarakat yang menganut protestan yang sebagian besar masyarakatnya merupakan *Unionist* cenderung untuk memilih keluar.

Tabel 3.5 Hasil Referendum Brexit menurut Tingkat Pendidikan di Irlandia Utara

	Bertahan	Keluar
Strata 3	80%	20%
Strata 2	71%	29%
Strata 1	57%	43%
Sekolah Tingkat Atas	59%	41%
Sekolah Tingkat Menengah	52%	48%
Sekolah Pertama	48%	52%
Tidak Sekolah	49%	51%

Masyarakat Irlandia Utara yang relatif berpendidikan cenderung ikut menentukan pilihannya dalam referendum Brexit dikarenakan mereka mempunyai kesadaran bahwa pilihannya dalam referendum dapat menentukan nasib Irlandia Utara di masa depan. Dalam tabel diatas masyarakat yang berpendidikan cenderung untuk memilih bertahan dikarenakan adanya kesadaran keanggotaan Britania Raya dapat memiliki keuntungan bagi Irlandia Utara.

Tabel 3.6 Hasil Referendum Brexit menurut Tingkatan Sosial di Irlandia Utara

	Bertahan	Keluar
AB: Profesional,	78%	22%

manajer menengah, dan manjerial		
C1:Manajer tingkat pertama, dan pegawai administratif	60%	40%
C2:Pekerja dengan keahlian	48%	52%
DE:Pekerja tidak mempunyai keahlian, pekerjaan tingkat bawah, dan pengangguran	51%	49%

Masyarakat Irlandia Utara yang bekerja atau mempunyai usaha yang bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung akan memilih sebuah pilihan yang tidak akan merugikan pekerjaannya atau usaha mereka dalam referendum Brexit. Dalam tabel tersebut masyarakat yang berada di tingkat sosial AB dan C1 yang terdiri dari profesional serta manajerial cenderung memilih bertahan. Pilihan bertahan tersebut dilakukan karena adanya keinginan agar kepentingannya tidak dirugikan dengan hasil referendum Brexit kedepannya.

Menurut O'Doherty¹¹ (2016), perjanjian Bellfast tahun 1998 berdampak kepada sikap pragmatis terhadap nasionalisme di Irlandia Utara, seperti meskipun masyarakat Irlandia Utara sudah lama menjadi bagian dari Britania Raya namun tidak memiliki keterikatan dengan etnis *British* atau pemerintahan Britania Raya. Namun di sisi lain, masyarakat Irlandia Utara tidak mengidentifikasi secara khusus diri mereka sebagai nasionalis atau republik, namun merasa kuat sebagai etnis *Irish*. Hasil dari referendum *Brexit* ini telah merusak hubungan antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia dan Britania Raya dengan Uni Eropa, yang membuat hubungannya tidak memberikan kenyamanan. O'Doherty

¹¹ Seorang jurnalis dan pengamat politik di Irlandia Utara

berspekulasi bahwa ada kemungkinan perubahan kembali pola pikir dari kalangan nasionalis yang mempunyai pemikiran untuk memilih melawan persatuan dari etnis *Irish*. Kaum nasionalis harus belajar dari sejarah politik di Irlandia Utara untuk menghentikan efek dari isu tentang identitas yang mengakibatkan posisi pemerintah Irlandia Utara menjadi tidak stabil, terutama jika kaum *Unionist* menjadi pemenang di pemilihan umum.

Dalam jurnal yang diterbitkan oleh *The British Journal of Politics and International Relations*, juga membahas tentang Irlandia Utara dan *Brexit*. Jurnal tersebut menyatakan bahwa untuk menjelaskan referendum *Brexit* di Irlandia Utara dapat melihat dari empat faktor, yaitu identitas, politik, konstitusi, dan kombinasi dari itu semua untuk membuat kondisi politik stabil.

Faktor etno-nasional telah mempengaruhi sikap masyarakat dalam menentukan pilihannya saat Referendum *British Exit*. Hal tersebut juga mempengaruhi pemilih nasionalis atau Katolik dalam memberikan pilihannya bertahan. Alasan untuk memilih bertahan karena adanya persamaan identitas. Hasil referendum tersebut telah menghasilkan kaum nasionalis dan Katolik mendukung Britania Raya untuk tetap berada dalam keanggotaan Uni Eropa.

BAB 5.KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan uraian tentang hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, pada bab lima ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Referendum *Brexit* pernah terjadi pada tahun 1975 dan menghasilkan keputusan bahwa Britania Raya tetap bertahan menjadi anggota Uni Eropa. Namun di kesempatan saat ini, pemerintah Inggris mengkampanyekan dan membujuk negara pesemakmuran Britnaia Raya (Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales) untuk memilih keluar. Akan tetapi pada referendum *Brexit* 2016, masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan seperti Skotlandia. Konsekuensi alasan dari masyarakat Irlandia Utara bertahan di Uni Eropa karena adanya keterkaitan dengan faktor sosiologis (agama dan etnis). Hasil dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa masyarakat yang memilih bertahan karena mempunyai keterikatan dengan partai kontra *Brexit*. Bentuk keterikatan tersebut berasal dari kesamaan agama dan etnis, namun penulis menemukan faktor terbaru dari alasan masyarakat Irlandia Utara memilih bertahan selain faktor sosiologis, yaitu dari model psikologis serta model pilihan rasional.

Penulis menemukan temuan terbaru dari alasan masyarakat yang memilih bertahan dari model psikologis. Alasan tersebut dikarenakan adanya asumsi masyarakat Irlandia Utara jika memilih keluar maka kebijakan *Common Travel Area* akan dihapuskan sebagai dampak dari Britania Raya keluar di Uni Eropa. Kebijakan *Common Travel Area* (CTA) telah mengakomodir masyarakat Irlandia Utara dalam mengunjungi negara Republik Irlandia. Tujuan dari masyarakat Irlandia Utara yang berkunjung adalah sebagian besarnya untuk mengunjungi keluarga ataupun saudara di Republik Irlandia. Akhirnya masyarakat Irlandia Utara yang mendukung kebijakan CTA yang dikeluarkan oleh pemerintah memilih untuk bertahan dalam referendum, dengan harapan kebijakan tersebut tetap berlaku.

Pada model pilihan rasional, penulis menemukan temuan baru terkait dengan pilihan masyarakat yang memilih bertahan dalam referendum karena alasan ekonomi. Kondisi yang mendasari masyarakat berasumsi tersebut karena ketergantungan Irlandia Utara dengan Uni Eropa pada bidang ekonomi. Uni Eropa telah memberikan bantuan dana yang lebih besar dari yang diberikan oleh Britania Raya. Bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa meliputi pembangunan infrastruktur serta bantuan untuk pembangunan di berbagai sektor. Nilai ekspor Irlandia Utara lebih besar kepada negara-negara Uni Eropa daripada ke negara di Britania Raya. Hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai pilihan rasional yang dilakukan oleh masyarakat Irlandia Utara untuk memilih bertahan dalam referendum *Brexit*. Jadi adanya ketergantungan Irlandia Utara terhadap Uni Eropa dalam bidang ekonomi telah menjadi bahan pertimbangan rasional dalam memilih bertahan di referendum *Brexit*. Masyarakat yang memilih bertahan mempunyai tujuan supaya kondisi ekonomi Irlandia Utara tetap stabil dibawah keanggotaan Britania Raya dalam Uni Eropa.

Referendum *British Exit* di Irlandia Utara dapat menjadi sebuah pelajaran terhadap studi demokrasi terutama dibidang partisipasi politik. Bahwa proses partisipasi politik masyarakat di Irlandia Utara telah dilakukan dengan ikut memberikan suara dalam referendum penentuan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Dalam penelitian ini menjelaskan alasan-alasan masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam menolak ataupun mendukung. Dari hal tersebut dapat menjadi pelajaran bahwa motif setiap pilihan bertahan dan keluar dalam referendum dapat dipengaruhi oleh model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hadi, Sutrisno, 1984, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*, Jilid Pertama, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Moelong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Mujani, Saiful, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan

Internet:

BBC (2013) *No Title David Cameron promises in/out referendum on EU*. Tersedia pada: <http://www.bbc.com/news/uk-politics-21148282> (Diakses: 12 November 2017).

BBC (2015) *Election 2015: David Cameron speech in full*. Tersedia pada: <http://www.bbc.com/news/uk-politics-32661073> (Diakses: 23 September 2017).

BBC (2016) *EU referendum: The result in maps and charts*. Tersedia pada: <http://www.bbc.com/news/uk-politics-36616028> (Diakses: 7 April 2017).

BBC (2017) *Guide to the parties: Green Party - BBC News*. Tersedia pada: <http://www.bbc.com/news/election-2017-39887723> (Diakses: 31 Mei 2017).

Boland, S. (2016) *Your EU referendum vote could change things forever in Northern Ireland*. Tersedia pada: <http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/06/your-eu-referendum-vote-could-change-things-forever-northern-ireland> (Diakses: 28 Agustus 2017).

Bond, I., Besch, S., Gostyńska-Jakubowska, A., Korteweg, R., Mortera-Martinez, C. dan Tilford, S. (2016) "Europe after Brexit Unleashed or undone?," (April), hal. 16. Tersedia pada: https://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_euafterBrexit_15april16.pdf.

Brada, T. dan Foster, P. (2016) *No Title*. Tersedia pada: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/uk-votes-brexit-now-is-time->

to-see-who-was-bluffing/ (Diakses: 1 Januari 2017).

Britannica (2016) *United Kingdom*. Tersedia pada: <https://www.britannica.com/place/United-Kingdom> (Diakses: 23 Februari 2017).

Brokenshire, J. dan Adams, G. (2017) "Northern Ireland : how will the political stalemate end , and will there be a referendum to leave the UK ?," hal. 1–2.

Burke, E. (2016) "Who will speak for Northern Ireland," *The Rusi Journal*, 161(2), hal. 4–9. doi: 10.1080/03071847.2016.1174477.

Curtis, J., Bowers, P., McGuinness, T. dan Webb, D. (2017) "Brexit Negotiations : The Irish border question," (8042).

Dennison, J. (2015) *LSE BREXIT – The EU referendum in Northern Ireland: Good Europeans or sectarian politics as usual?* Tersedia pada: <http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2015/11/12/the-eu-referendum-in-northern-ireland-good-europeans-or-sectarian-politics-as-usual/> (Diakses: 6 Juli 2017).

Forster, A. (2002) *Euroscepticism in contemporary British politics : opposition to Europe in the British Conservative and Labour Parties since 1945*. Tersedia pada: [http://www.routledge.com/shopping_cart/products/product_detail.asp?sku=&isbn=9780415287319&parent_id=&pc=/shopping_cart/search/search.asp?search=Euroscepticism in contemporary British politics](http://www.routledge.com/shopping_cart/products/product_detail.asp?sku=&isbn=9780415287319&parent_id=&pc=/shopping_cart/search/search.asp?search=Euroscepticism%20in%20contemporary%20British%20politics).

Fruen, L. dan Mullin, G. (2017) *What is Brexit, how many people voted to leave the EU and when did Theresa May trigger Article 50?* Tersedia pada: <https://www.thesun.co.uk/news/2099807/brexit-article-50-eu-theresa-may/> (Diakses: 31 Mei 2017).

Gallagher, T. (2017) "Resistance from Scotland Britain After Brexit Resistance from Scotland," 28(1), hal. 31–41.

Gallagher dan Uleri (1996) "ReferendumExperience." London: MACMILLAN PRESS LTD, hal. 255.

Garry, J. (2016) "The EU referendum Vote in Northern Ireland: Implications for our understanding of citizens' political views and behaviour," *Knowledge Exchange Seminar Series*. Tersedia pada: http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/raise/knowledge_exchange/briefing_papers/series6/garry121016.pdf.

Garry, J. (2017) *EU referendum: one year on – Northern Ireland – UK in a*

changing Europe. doi: PE 583 116.

- Garry, J., O’Leary, B. dan Coakley, J. (2017) *How Northern Ireland voted in the EU referendum – and what it means for border talks*. Tersedia pada: <http://theconversation.com/how-northern-ireland-voted-in-the-eu-referendum-and-what-it-means-for-border-talks-76677> (Diakses: 28 Agustus 2017).
- Goodwin, M. J. dan Heath, O. (2016) “The 2016 Referendum, Brexit and the Left Behind: An Aggregate-level Analysis of the Result,” *Political Quarterly*, 87(3), hal. 323–332. doi: 10.1111/1467-923X.12285.
- Harmesen, R. dan Spiering (eds.), M. (2004) *Euroscepticism: Party Politics, National Identity and European Integration*. Diedit oleh M. Spiering. Amsterdam: Rodopi B.V.
- Heywood, A. (2002) *Palgrave Foundations*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Ipsos MORI (2016) *Ipsos MORI Northern Ireland poll on the EU Referendum*. Tersedia pada: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/ipsos-mori-northern-ireland-poll-eu-referendum?language_content_entity=en-uk (Diakses: 6 Juli 2017).
- Iqbal, M. (2016) *PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA PARTAI-PARTAI EUROSCEPTIC DALAM PEMILIHAN UMUM PARLEMEN UNI EROPA TAHUN 2014: STUDI KASUS UNITED KINGDOM INDEPENDENCE PARTY DAN BARISAN NASIONAL*. Universitas Jember.
- Ireland, N. (2017) “Additional Data Paper : Common Travel Area Data and Statistics,” (May), hal. 1–8.
- Jensen, M. D. dan Snaith, H. (2016) “When politics prevails: the political economy of a Brexit,” *Journal of European Public Policy*, 23(9). doi: 10.1080/13501763.2016.1174531.
- Kentish, B. (2016) *Labour Party’s position on Brexit’ | The Independent*. Tersedia pada: <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/jeremy-corbyn-labour-position-tom-watson-article-50-brexit-a7400976.html> (Diakses: 31 Mei 2017).
- Kirk, A. (2016) *EU referendum: Which type of person wants to leave, and who will be voting to remain?, 22 JUNE*. Tersedia pada: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/eu-referendum-which-type-of-person-wants-to-leave-and-who-will-b/> (Diakses: 3 Maret 2017).

- LucidTalk (2016) "April 2016 LucidTalk Monthly Tracker Poll (Northern Ireland) Results NI Party Leader Ratings , NI Political Party Ratings , Ratings , NI Assembly Seat Predictor , and UK EU Referendum poll results . results POLL QUESTIONS RESULTS - SUMMARY REPORT : REPO," 7800(April).
- Mccann, G. dan Hainsworth, P. (2016) "Brexit and Northern Ireland : the 2016 referendum on the United Kingdom ' s membership of the European Union," *Irish Political Studies*. Taylor & Francis, 0(0), hal. 1–16. doi: 10.1080/07907184.2016.1243530.
- McCann, G. dan Hainsworth, P. (2016) "Brexit and Northern Ireland: the 2016 referendum on the United Kingdom's membership of the European Union," *Irish Political Studies*. Taylor & Francis, 0(0), hal. 1–16. doi: 10.1080/07907184.2016.1243530.
- Murphy, M. C. (2016) "The EU referendum in Northern Ireland: Closing borders, re-opening border debates," *Journal of Contemporary European Research*, hal. 844–853.
- Parliament, E. (2013) *Legislative powers*.
- Parliament, E. (2015) "the European Parliament: the Citizen'S Voice in the Eu." doi: 10.2861/55900.
- Phinnemore, D., Galligan, Y., McCall, C., McGowan, L. dan Murphy, M. C. (2016) "EU Debate NI To Remain or Leave?," *CENTRE FOR DEMOCRACY AND PEACE BUILDING*, hal. 36. Tersedia pada: www.eudebateni.org.
- Revenue & Customs, H. (2015) "Regional Trade Statistics Third Quarter 2013," hal. 1–50.
- Ryan, B. (2016) *Brexit briefing: impact on Common Travel Area and the Irish - Free Movement*. Tersedia pada: <https://www.freemovement.org.uk/brexit-briefing-impact-on-common-travel-area-and-the-irish/> (Diakses: 10 Agustus 2017).
- Shapiro, Y. (2016) *EU poll: Over 25% fear Brexit would lead to border checkpoints in Ireland - BelfastTelegraph.co.uk*. Tersedia pada: <http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/brexit/eu-poll-over-25-fear-brexit-would-lead-to-border-checkpoints-in-ireland-34750308.html> (Diakses: 28 Agustus 2017).
- Startin, N., Costa, O., Brack, N., Mudde, C., Garnett, M., Lynch, P., Usherwood, S., Leruth, B., Leonard, D. dan Taylor, R. (2016) "The EU, Euroscepticism and Brexit," hal. 1061.

- Telegraph, B. (2016) *DUP confirms it will campaign for Brexit in Leave/Remain referendum* - *BelfastTelegraph.co.uk*. Tersedia pada: <http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/dup-confirms-it-will-campaign-for-brexit-in-leaveremain-referendum-34470806.html> (Diakses: 31 Mei 2017).
- Theguardian (2016) *EU referendum: full results and analysis*. Tersedia pada: <https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2016/jun/23/eu-referendum-live-results-and-analysis> (Diakses: 29 November 2016).
- Tonge, J. (2016) "The Impact and Consequences of Brexit for Northern Ireland," *Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament*.
- Trihartono, A. (2014) "Kuasa Rakyat Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru by Saiful Mujani, William R. Liddle, and Kuskridho Ambardi," *Social Transformations: Journal of the Global South*, 2(2), hal. 58–61. doi: 10.13185/ST2014.02206.
- Union, E. (2017) *European Union*. Tersedia pada: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en (Diakses: 1 Januari 2016).
- Vasbo, S. (2015) "Economic Consequences of Brexit for the United Kingdom," 4, hal. 0–84. Tersedia pada: <http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00004/Powers-and-procedures>.
- Walsh, J. (2016) *Britain's 1975 Europe referendum: what was it like last time?* Tersedia pada: <https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/25/britains-1975-europe-referendum-what-was-it-like-last-time> (Diakses: 1 Januari 2017).
- White, B. (2016) *EU referendum: How will Northern Ireland unionists and nationalists vote on June 23?* - *BelfastTelegraph.co.uk*. Tersedia pada: <http://www.belfasttelegraph.co.uk/opinion/columnists/bill-white/eu-referendum-how-will-northern-ireland-unionists-and-nationalists-vote-on-june-23-34475000.html> (Diakses: 31 Mei 2017).
- Young, D. dan Anne McKeown, L. (2016) *BREXIT: Northern Ireland's Remain vote prompts Irish union call from Sinn Fein* - *Independent.ie*. Tersedia pada: <http://www.independent.ie/business/brexit/brexit-northern-irelands-remain-vote-prompts-irish-union-call-from-sinn-fein-34829380.html> (Diakses: 5 Juli 2017).